

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS
PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Ilham Nadiva Wardhana

Nomor Mahasiswa : 17313125

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2021

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS
PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Ilham Nadiva Wardhana

Nomor Mahasiswa : 17313125

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2021

Penulis,



Ilham Nadiva Wardhana


PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

Nama : Ilham Nadiva Wardhana
Nomor Mahasiswa : 17313125
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Juni 2021
telah disetujui dan disahkan oleh

ace 19/6 2021 Dosen Pembimbing,
upain


Unggul Priyadi, Dr., M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019**

Disusun Oleh : **ILHAM NADIVA WARDHANA**

Nomor Mahasiswa : **17313125**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

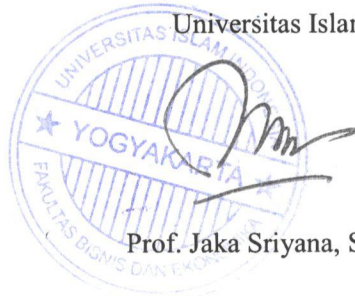
Pada hari, tanggal: **Rabu, 14 Juli 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi,Dr.,M.Si.

Penguji : Mohammad Bekti Hendrie Anto,,S.E., M.Sc.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur bagi kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga dapat diselesaikan skripsi yang berjudul :

“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019”

Shalawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menunjukkan jalan yang lurus dan diridhoi Allah SWT. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sehingga dapat memenuhi syarat untuk dapat meraih gelar sarjana strata-1 pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis berharap dengan mengerjakan skripsi ini dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberi semangat dan mendukung penulis tanpa henti serta keluarga yang selalu memanjatkan do'a dan restunya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Unggul Priyadi, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu yang tiada hentinya kepada penulis dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi sampai selesai dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing saya selama menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu yang telah membantu penulis dalam penyediaan data dalam penyusunan skripsi.
7. Sahabat terbaik Hevelina yang selalu memberi motivasi, arahan serta dapat memenuhi target penulis dalam mengerjakan skripsi hingga selesai dengan baik.
8. Sahabat perjuangan semasa kuliah sampai saat ini, "Fitriana, Naufal, Zubair, Naufhaldy, Riana, Annisa Dwi, Olivia Hayyun, Bagas Aulia, Ian Nugroho,

Suwardi, Fahri Siregar yang memberikan banyak ilmu dan pelajaran selama kuliah di Universitas Islam Indonesia.

9. Tim KKN unit 41, Bagus, Putra, Talitha, Zella, Belinda, Vashti, Delvia. Kalian sangat luar biasa.
10. Sahabat SMA di Ngawi, Geryn, Azis, Yudistya Tedy, Amel, Olga, Havy, Ikhsan, Aryo, Alfian, Dita, Mutiara yang selalu memberikan saran dan motivasi terhadap penulis. Kalian luar biasa !
11. Teman-teman se-perbimbingan skripsi Bapak Unggul Priyadi, Nuryana, Reyna Mualidya, Chintya Amira, Diyah, Selviana, Siwi Putri, Evania, Fathya yang telah memberi motivasi kepada penulis, dan selalu membantu penulis ketika menemukan kesulitan dalam mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat kekurangan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua para pembaca khususnya penulis secara pribadi. Amin Yaa Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaarakatuh.

Yogyakarta, Juni 2021



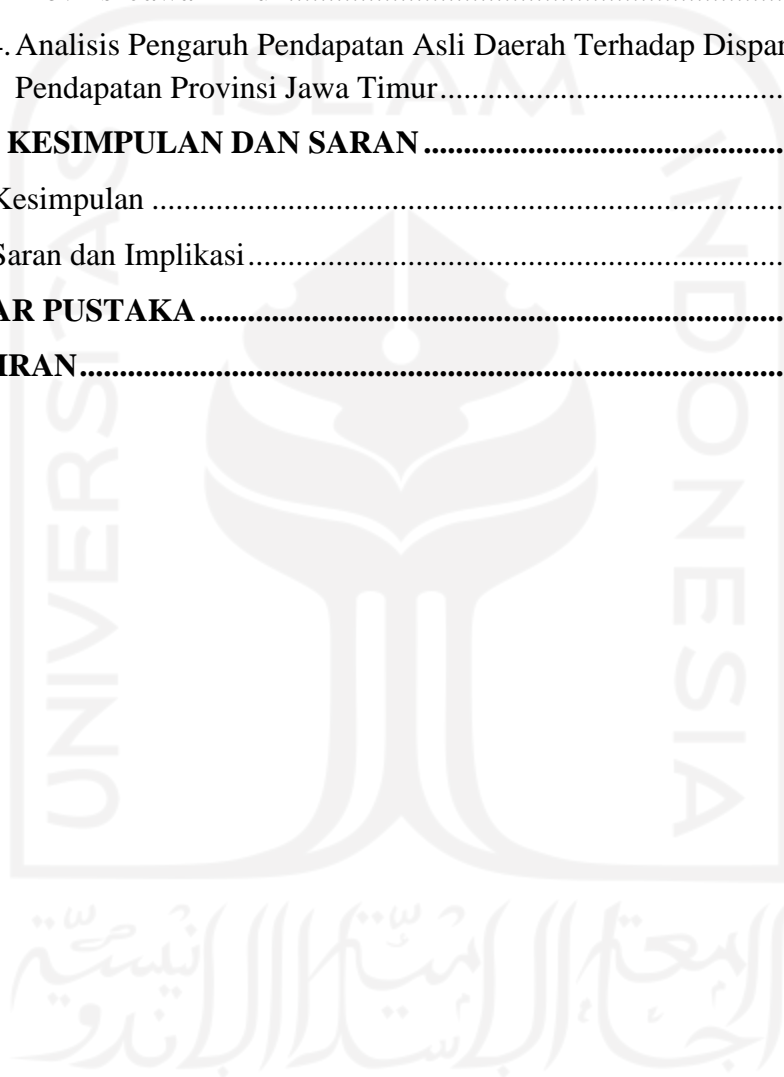
Ilham Nadiva Wardhana

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Kata Pengantar.....	iv
Halaman Daftar Isi.....	vii
Halaman Daftar Gambar.....	x
Halaman Daftar Grafik.....	xi
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
2.1. Kajian Pustaka.....	11
2.2. Landasan Teori.....	16
2.2.1. Disparitas Pendapatan.....	16
2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia.....	24
2.2.3. Tingkat Kemiskinan.....	26
2.2.4. Pendapatan Asli Daerah.....	29
2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia dengan Disparitas Pendapatan.....	30

2.2.6. Tingkat Kemiskinan dengan Disparitas Pendapatan.....	31
2.2.7. Pendapatan Asli Daerah dengan Disparitas Pendapatan.....	32
2.3. Kerangka Pemikiran.....	33
2.4. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Data	35
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	35
3.3. Metode Analisis	37
3.3.1. Model Regresi Data Panel	37
3.3.2. Uji Pemilihan Model	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Hasil Penelitian	42
1. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.....	43
2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur... ..	43
3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	45
4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	47
4.2. Analisis Deskriptif	49
4.3. Hasil dan Analisis Data	50
4.3.1. Metode <i>Common Effect</i> Model.....	50
4.4. Pemilihan Model Terbaik.....	51
4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	53
4.6. Hasil Uji Statistik	53
4.6.1. Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.6.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)	54
4.6.3. Uji Signifikansi (Uji T)	55

4.7.	Interpretasi dan Pembahasan.....	56
4.7.1.	Analisis <i>Cross Section Effect</i>	56
4.7.2.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	57
4.7.3.	Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	58
4.7.4.	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		61
5.1.	Kesimpulan	61
5.2.	Saran dan Implikasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN.....		64



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kurva Kuznets.....	17
2.2. Kurva Lorenz.....	19
2.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia.....	25
2.4. Lingkaran kemiskinan.....	28
2.5. Kerangka Pemikiran.....	33



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1. Nilai Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 (Rasio)	4
1.2. Nilai Indeks Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.	6
4.1. Rata-rata Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	42
4.2. Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	44
4.3. Rata-rata Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	46
4.4. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	47
4.5. <i>Cross Section Effect</i>	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
4.1. Analisis Deskriptif.....	49
4.2. Hasil Regresi Common Effect Model.....	50
4.3. Hasil Regresi Fixed Effect Model.....	50
4.4. Hasil Regresi Random Effect Model.....	51
4.5. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow.....	52
4.6. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman.....	52
4.7. Hasil Uji Normalitas.....	53
4.8. Hasil Regresi dengan Metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	54
4.9. Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Independen.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
	Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat	
I	Kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota	
	Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	68
II	Estimasi Persamaan Regresi.....	76



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan yaitu data panel yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* yang mencakup 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang diambil dari Badan Pusat Statistika dan Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yakni metode regresi data panel dengan menggunakan *E-views* 9. Hasil dari regresi penelitian ini menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Dimana Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap *Gini Ratio*. Sementara Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Gini Ratio*.

Kata kunci: Disparitas Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Asli Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di setiap daerah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara optimal. Tujuan pembangunan ekonomi salah satunya adalah untuk pemerataan ekonomi, karena pemerataan ekonomi tanpa didukung oleh pembangunan ekonomi maka akan sulit untuk dicapai. Menurut Arsyad (2010), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses naiknya pendapatan riil per kapita di suatu negara dalam jangka panjang dan adanya keterkaitan antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi untuk dianalisis secara nasional maupun regional. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan faktor-faktor dalam proses naiknya pendapatan riil perkapita pada suatu negara guna melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat dianalisis secara nasional maupun regional atau antar suatu daerah.

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat diukur dari sektor pertumbuhan ekonomi. Arif & Wicaksani(2017) mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam pencapaian pembangunan ekonomi yang dapat dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto. Tujuan dari pemerataan ekonomi adalah untuk

keseimbangan antara proses pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan disparitas pendapatan, ketika negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan diikuti dengan rendahnya disparitas pendapatan pada suatu daerah maka perekonomian akan merata. Berbanding terbalik ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi maka akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan akan berdampak pada *trade off* antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan di setiap daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi maka akan menyebabkan disparitas pendapatan.

Disparitas pendapatan merupakan aspek yang umum terjadi pada suatu negara dalam konteks distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, kelompok masyarakat berpendapatan sedang dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta masalah pembangunan ekonomi antardaerah yang tidak merata. Oleh sebab itu disparitas pendapatan selalu terjadi, baik di negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju. Hal yang membedakan di setiap daerah adalah seberapa besar disparitas pendapatan yang terjadi pada masing-masing daerah tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan antar daerah yaitu perbedaan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kondisi demografis di setiap daerah,

serta kondisi sosial budaya. Hal yang terjadi akibat dari perbedaan potensi yang dimiliki setiap daerah adalah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi di suatu daerah menjadi berbeda dan menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi yang dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian di beberapa daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga terdapat daerah yang maju dan daerah yang terbelakang (Sjafrizal, 2012).

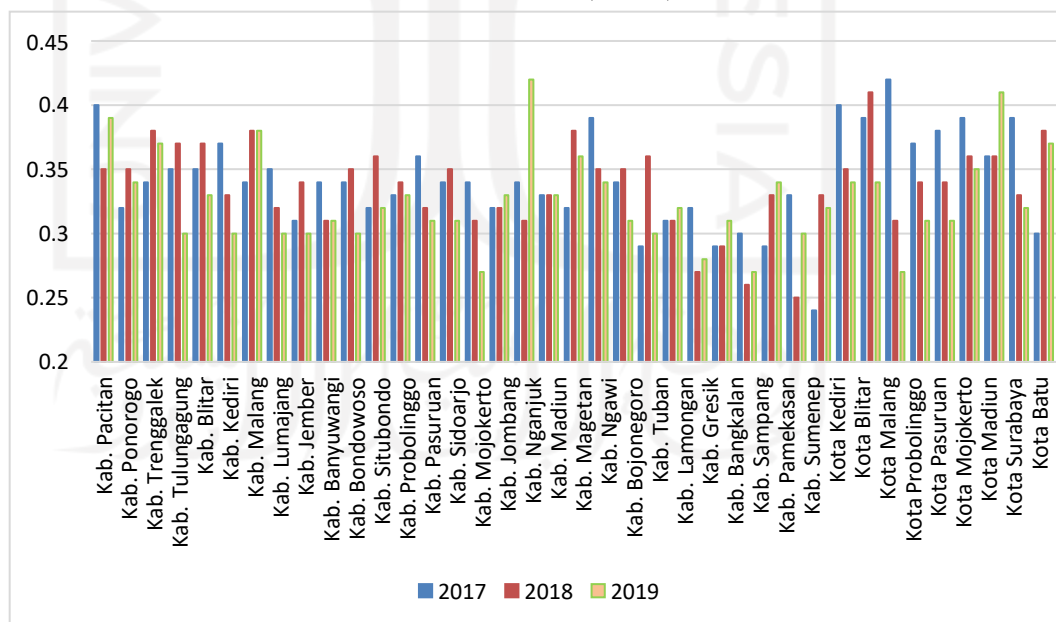
Peningkatan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang disebabkan oleh meningkatnya pembangunan ekonomi pada daerah masing-masing. Tujuan pembangunan ekonomi bukan hanya semata-mata untuk menciptakan masyarakat modernisasi, namun hal yang lebih utama adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan merata keada seluruh masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Indonesia sampai saat ini belum bisa mengatasi masalah disparitas, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita tidak merata, kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki daya tarik objek wisata pada daerah tertentu dan dapat dikembangkan agar menjadi pusat perekonomian masyarakat setempat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah harus memprioritaskan potensi yang

dimiliki pada suatu daerah tersebut, agar setiap daerah dapat berkembang dengan potensi yang dimiliki sehingga diharapkan dapat menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga daerah tersebut dapat mengalami pertumbuhan ekonomi dan mengurangi masalah disparitas pendapatan pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Usaha-usaha pembangunan yang tepat sasaran dapat memberikan hasil dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan antar daerah. Disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2014-2019 ditunjukkan pada Grafik 1.1

Grafik 1.1.

Nilai Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 (Rasio)

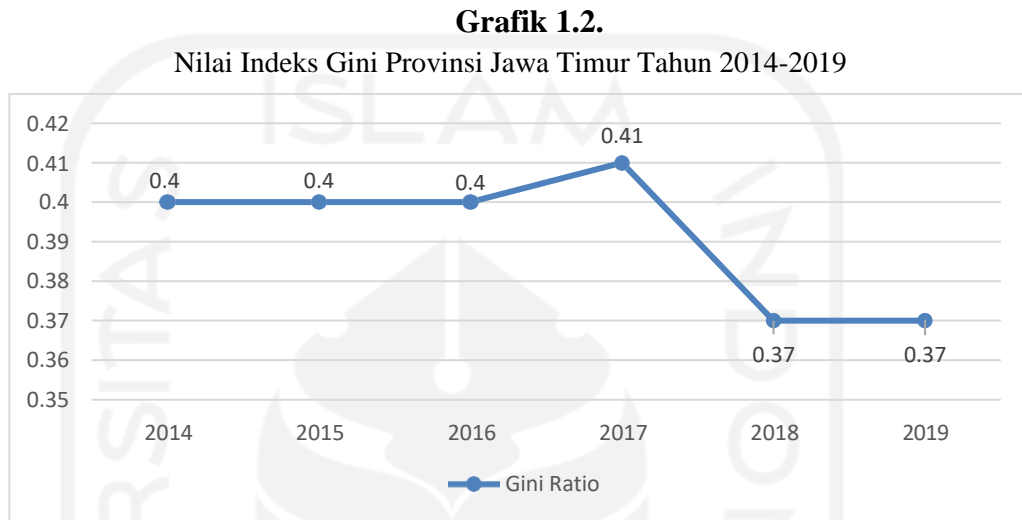


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur (2020)

Berdasarkan Grafik 1.1. yang menggambarkan perbandingan nilai indeks gini rasio di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,38 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,37. Pada tahun 2017 angka disparitas pendapatan tertinggi yaitu Kota Probolinggo sebesar 0,42 dan angka disparitas terendah yaitu Kabupaten Sampang sebesar 0,3. Tahun 2018 angka disparitas pendapatan tertinggi yaitu Kota Malang sebesar 0,41 dan angka disparitas terendah yaitu Kabupaten Sumenep sebesar 0,25. Pada tahun 2019 angka disparitas pendapatan tertinggi yaitu Kabupaten Nganjuk sebesar 0,42 dan angka disparitas terendah yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sampang dan Kota Probolinggo sebesar 0,27. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya nilai indeks gini ratio pada daerah tertentu, diantaranya adalah kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang dan distribusi kekayaan yang tidak merata.

Rasio Indeks Gini merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio antara 0 hingga 1. Kategori ketimpangan rendah ketika nilai rasio gini kurang dari 0,4. Kategori ketimpangan sedang ketika nilai rasio gini antara 0,4 hingga 0,5. Kategori ketimpangan tinggi ketika nilai rasio gini sebesar 0,5. Untuk

melihat perbandingan angka gini ratio Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 ditunjukkan pada Grafik 1.2.



Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur (2020)*

Grafik 1.2. dapat diketahui bahwa angka indeks gini Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2014-2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2014 hingga tahun 2016 yaitu sebesar 0,4 tetapi naik sebesar 0,41 pada tahun 2017 dan kembali turun sebesar 0,37 pada tahun 2018 hingga tahun 2019 dikategorikan ketimpangan rendah, hal ini terjadi karena pengeluaran penduduk pada perkotaan maupun pedesaan berada pada kategori ketimpangan rendah.

Ketimpangan pendapatan terjadi dimana pendapatan yang diterima oleh semua kalangan masyarakat tidak merata dan ditentukan oleh tingkat pembangunan suatu daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kurang memanfaatkan adanya *property rights* pada daerah yang

mempunyai potensi sumber daya melimpah. Ketimpangan distribusi pendapatan telah menjadi persoalan lama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara miskin dan negara berkembang.

Secara garis besar pembangunan ekonomi pada setiap daerah memang tidak selalu merata, hal yang menyebabkan tidak meratanya pembangunan ekonomi adalah perbedaan kandungan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga disparitas pendapatan menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat dituntaskan secara maksimal hingga saat ini. Pencapaian pertumbuhan ekonomi masih belum mampu untuk mengatasi suatu masalah yang timbul akibat tidak meratanya pembangunan yang disebabkan oleh beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat, tetapi beberapa daerah yang lain mengalami pertumbuhan ekonomi lambat (Kuncoro, 2006). Kesimpulan yang diperoleh dari pernyataan diatas adalah disparitas pendapatan masih menjadi masalah yang harus segera di tuntaskan, pemerintah sebagai garda terdepan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan pada daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan insfratraktur untuk pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kebutuhan aerah masing-masing. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan untuk menlanjutkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi sektor-sektor daerah tertentu agar daerah tersebut dapat berkembang dan

menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2014-2019.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar tingkat Disparitas Pendapatan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019
2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019

3. Untuk menganalisis besarnya tingkat Disparitas Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019

1.4. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat disparitas pendapatan, sehingga dapat mengambil kebijakan selanjutnya untuk mengatasi masalah disparitas pendapatan.
2. Diharapkan memberikan informasi tambahan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan disparitas pendapatan untuk mengurangi tingkat disparitas pendapatan pada suatu daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian terdiri dari kerangka penulisan dari masing-masing bab. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi garis besar penelitian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai uraian teori dan konsep yang digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian dan analisa terhadap

data-data yang diperoleh.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai obyek penelitian, model penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, hipotesis, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai topik penelitian, dengan melakukan regresi perhitungan model yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019.

BAB 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian, saran dan implikasi yang dihadapi selama penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian sebelumnya diperlukan dalam pengerjaan skripsi ini karena digunakan sebagai gambaran dan rujukan dalam proses penelitian ini. Diperlukannya penelitian sebelumnya agar penelitian yang sedang dilakukan dapat memperaharui informasi dan pembahasan selama periode penelitian dan agar hasil dari penelitian dapat sempurna.(Diurutkan berdasarkan tahun)

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian
1	Lailatul Khusnah; Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2008-2013; Jurnal Ekonomi Pembangunan ; 2015	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dan analisis trend & analisis korelasi dengan hasil penelitian Dana alokasi umum(DAU), Produk domestik reginal bruto(PDRB) berpengaruh negatif signifikan pada kesenjangan pendapatan, Sedangkan Tenaga Kerja Terdidik berpengaruh secara parsial terhadap Kesenjangan Pendapatan
2	Darzal; Analisis Disparitas Pendapatan	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel

<p>dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi; Jurnal perspektif pembiayaan dan pembangunan daerah; 2016</p>	<p>dengan hasil penelitian Belanja langsung dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja(TPAK) memiliki pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, sedangkan sarana dan prasarana transportasi menggunakan variabel panjang jalan dalam kondisi baik tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita</p>
<p>3 Afina Azaka Fauzia dan Diky Aji Suseno; Analisis Determinan Disparitas Pendapatan di Kawasan Purwomanggung Tahun 2009-2015;Jurnal Analisis Ekonomi pembangunan; 2017</p>	<p>Metode Penelitian yang digunakan metode adalah regresi data panel gabungan data runtuk waktu (time series) dan data silang tempat (cross section) dengan hasil pembahasan pertumbuhan ekonomi, Indeks pembangunan manusia (IPM), Investasi, berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan sedangkan nilai pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan</p>
<p>4 Widya Andi Karmila Saputri dan Kris Suryowati; Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gini Ratio di Provinsi Papua</p>	<p>Metode Penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel dergan hasil pembahasan Indeks pembangunan manusia(IPM), Luas panen palawija, Lokasi yang berdekatan memiliki pengaruh</p>

	dengan Model Spasial Data Panel; Jurnal Statistika Industri dan Komputasi; 2018	positif terhadap gini ratio di Provinsi Papua
5	Dea Fajar ayu, Westi Riani dan Meidy Haviz; Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2016; Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi; 2019	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode regresi Ordinary Least Square(OLS) dengan hasil pembahasan Pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan
6	Ellza Alfya Rahma; Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016; Jurnal Publikasi; 2018	Metode Penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect dengan hasil pembahasan Produk domestik regional bruto(PDRB), Indeks pembangunan manusia(IPM) dan tingkat pengangguran terbuka(TPT) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Tingkat partisipasi Angkatan kerja(TPAK) tidak berpengaruh

-
- secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- 7 Sabda Imani Rubairko: Metode Penelitian yang digunakan Analisis Disparitas adalah metode linear berganda Pendapatan di Provinsi dengan hasil pembahasan Jawa Timur Tahun 2008- Pertumbuhan ekonomi, 2011; Jurnal Ilmiah pengangguran terbuka, angka Fakultas Ekonomi dan pareisipasi kasar dan aglomerasi Bisnis; 2013 secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan.
- 8 I Komang Oka Artana Metode penelitian yang digunakan Yasa ;Pengaruh adalah analisis jalur(path analisis) Pertumbuhan Ekonomi dengan hasil pembahasan dan Disparitas Pertumbuhan ekonomi berpengaruh Pendapatan Antar daerah negatif dan signifikan terhadap Terhadap kesejahteraan kesejahteraan masyarakat Provinsi Masyarakat Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi Bali; Jurnal Ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap Kuantitatif Terapan; 2015 kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali melalui disparitas pendapatan antar daerah, disparitas pendapatan antardaerah merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.
-

-
- 9 Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksana; Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya; ISSN 2407-9189;2017 Metode Penelitian digunakan adalah metode regresi data panel dari penggabungan data time series dengan hasil pembahasan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan Nilai pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015
- 10 Sri Danawati, I K.G. Bendesa dan Made Suyana Utama; Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali; Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ; 2016 Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Analysis Moment of Structural (AMOS) dengan hasil pembahasan bahwa selama periode tahun 2005-2013 di Provinsi Bali investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan
-

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah periode tahun penelitian, variabel penelitian yang digunakan dan beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan lokasi penelitian. Diharapkan dalam pembuatan penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan karena menganakan periode tahun terbaru dan menggunakan referensi penelitian sebelumnya.

2.2. Landasan Teori

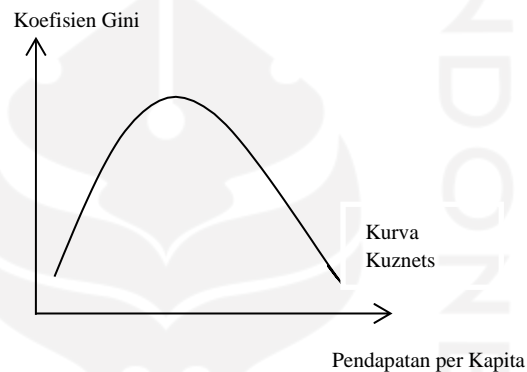
2.2.1. Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan antardaerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam proses pembangunan ekonomi pada suatu daerah, baik dari sisi pembangunan regional maupun nasional. Disparitas pendapatan disebabkan oleh perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah dan perbedaan kandungan sumber daya alam pada suatu daerah. Sehingga terdapat daerah yang relatif maju dan daerah yang relatif terbelakang serta membawa implikasi terhadap kesejahteraan dalam bentuk ketidakpuasan masyarakat (Sjafrizal, 2012). Terjadinya perbedaan kesejahteraan menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah yang menimbulkan *gap* atau perbedaan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Teori Neo Klasik menemukan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dengan disparitas pendapatan antardaerah. Teori disparitas pendapatan pertama kali muncul dari suatu hipotesis yaitu “U-terbalik” yang dikemukakan oleh Simon Kuznet tahun 1995. Kuznet (1995) menyatakan

bahwa awal mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan tidak merata. Proses ini akan terus terjadi hingga disparitas mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan berlanjut dalam skala jangka panjang, maka disparitas pendapatan akan mengalami penurunan. Kurva Kurznets dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kurva Kuznets



Sumber: Todaro dan Smith, 2009

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat diketahui bahwa adanya hubungan antara pendapatan perkapita dengan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Apabila garisnya semakin cekung maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, sebaliknya apabila semakin landai maka distribusi pendapatan akan semakin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan disparitas pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznets tidak dapat dipungkiri, semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing daerah (Todaro dan Smith, 2009).

A. Ukuran Disparitas

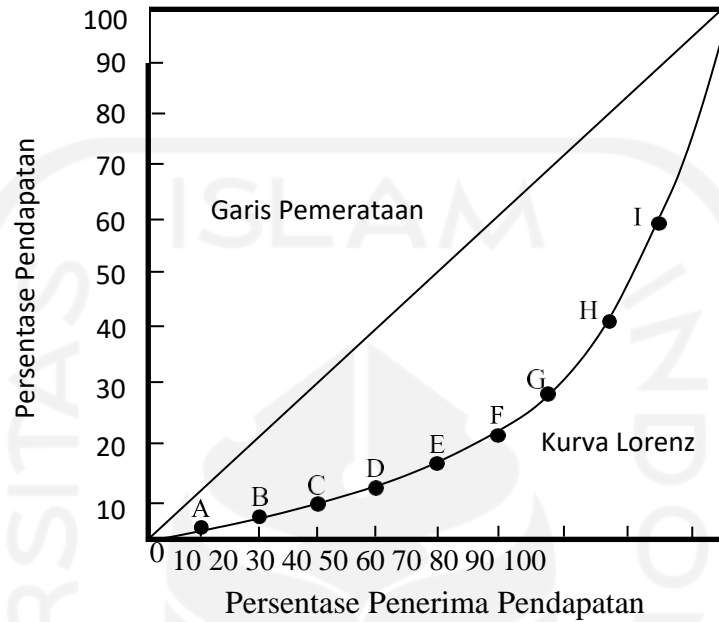
1. *Size Distribution*

Size distribution merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom untuk menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Dalam *size distribution* disparitas secara umum dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin, ukuran disparitas dapat dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen anggota kelompok bawah (lapisan penduduk paling miskin) dengan persentase yang diterima oleh 20 persen anggota kelompok atas (lapisan penduduk terkaya). Rasio inilah yang sering digunakan sebagai ukuran tingkat ketidakmerataan antara kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya di suatu negara (Soebagyo, 2016).

2. Kurva *Lorenz*

Conrad Lorenz dalam pembahasan Kurva *Lorenz* menghubungkan penerimaan pendapatan dan relative yang dikumulatikan sebagai sumbu vertikal, dengan pendapatan yang sudah dikelompokkan dalam *percentiles* sebagai sumbu horizontal. Kurva *Lorenz* dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Kurva Lorenz



Sumber: Todaro dan Smith, 2009

Berdasarkan Gambar 2.2. dapat diketahui bahwa sumbu horizontal menunjukkan jumlah penerimaan pendapatan dalam persentase kumulatif, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan total pendapatan yang diterima oleh penduduk. Setiap titik pada garis diagonal merupakan persentase jumlah penerima, ketika kurva Lorenz semakin dekat dari diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya apabila kurva Lorenz berada semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menunjukkan keadaan yang semakin buruk dan distribusi pendapatan semakin timpang serta tidak merata.

3. Indeks Gini

Disparitas pendapatan dapat diukur menggunakan Indeks Gini. Koefisien Gini merupakan ukuran dari ketidakmerataan suatu pendapatan yang angkanya berkisar antara nol hingga satu. Apabila nilai gini 0, maka pemerataan sempurna atau disparitas yang rendah. Dan apabila nilai gini 1, maka ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan atau menunjukkan disparitas yang tinggi (Soebagyo, 2016). Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Gini adalah:

$$G = \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{1000}$$

Keterangan:

G = Indeks Gini

P_i = Presentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i Q_{i-1}

= Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i K

= Banyaknya kelas pendapatan nilai

Apabila:

G < 0,3 = Ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang

G > 0,5 = Ketimpangan tinggi

B. Penyebab dan Kebijakan Disparitas

Menurut Sjafrizal (2012), faktor-faktor yang menyebabkan disparitas pendapatan antardaerah adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam disebabkan oleh adanya daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam tinggi dapat memproduksi barang dengan biaya relatif murah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sedangkan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam kecil akan memproduksi barang dengan biaya produksi lebih tinggi dan daya saingnya lemah. Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya disparitas pendapatan antardaerah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Perbedaan kondisi demografis yang cukup besar dapat mendorong terjadinya disparitas, karena kondisi demografis yang baik akan memiliki produktivitas kerja lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja.

Sebaliknya, apabila kondisi demografis kurang baik maka akan menyebabkan produktivitas kerja rendah dan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah.

a. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kondisi ini disebabkan oleh kegiatan perdagangan antardaerah dan transmigrasi yang tidak lancar. Apabila migrasi tidak lancar, maka akan menyebabkan tenaga kerja yang berlebihan di suatu daerah dan

tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila disparitas pendapatan antardaerah cenderung tinggi pada negara berkembang, di mana mobilitas barang dan jasa kurang lancar.

b. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan kegiatan ekonomi yang besar dapat mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut disebabkan oleh sumber daya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, menurunnya fasilitas transportasi kegiatan ekonomi antardaerah, kondisi demografis di mana sumber daya manusia tersedia dengan kualitas yang lebih baik.

c. Alokasi Dana Pembangunan Antardaerah

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, daerah dengan alokasi investasi lebih besar dari pemerintah akan cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini akan mendorong proses pembangunan daerah melalui lapangan kerja yang lebih banyak. Demikian pula sebaliknya, apabila investasi rendah maka tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan lambat.

Dilihat dari faktor-faktor yang menentukan disparitas antardaerah,

maka perlu adanya kebijakan dan upaya untuk menanggulangnya yaitu kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan dan upaya tersebut antara lain (Sjafrizal, 2012):

a. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Kebijakan dan upaya penyebaran pembangunan prasarana dan sarana secara merata yaitu dengan memperbaiki fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan guna mendorong proses perdagangan antardaerah. Selain itu, jaringan dan fasilitas komunikasi juga sangat penting untuk dikembangkan agar tidak ada daerah yang terpencil. Dengan demikian daerah yang kurang maju dapat meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi, sehingga dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan mendorong proses pembangunan.

b. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk ke daerah yang kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan dari pemerintah. Sedangkan migrasi spontan merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela dengan menggunakan biaya sendiri. Hal ini dapat mengatasi kurangnya tenaga kerja yang sedang dialami oleh daerah terbelakang, sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar dan dapat mengurangi disparitas pendapatan.

c. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan dan upaya ini dapat mengurangi disparitas antardaerah karena pusat pertumbuhan menganut konsep konsentrasi dan

desentralisasi. Konsep konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan mempertahankan tingkat efisiensi usaha. Sedangkan konsep desentralisasi adalah untuk penyebaran pembangunan antardaerah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan pusat- pusat pertumbuhan dalam skala kecil dan menengah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan pembangunan yang telah tersebar secara merata.

d. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Terlaksanakannya konsep otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, masyarakat dapat menggali potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga proses pembangunan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan disparitas pendapatan antardaerah akan berkurang.

2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia

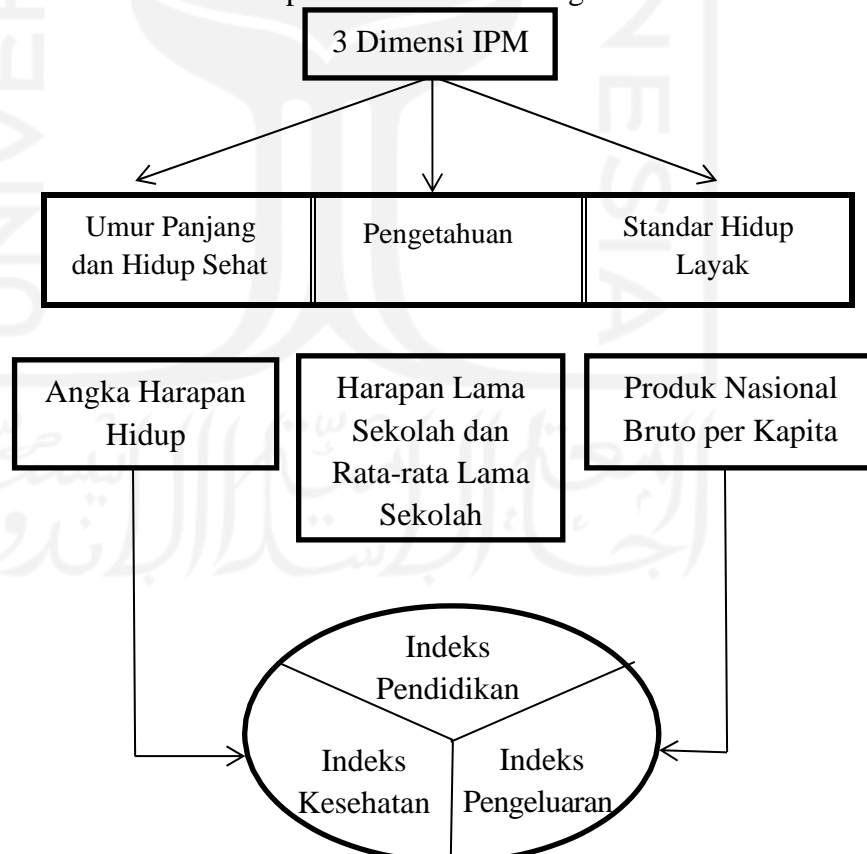
Todaro & Smith (2009) mengemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan cara yang digunakan untuk mengukur pencapaian dalam suatu pembangunan manusia suatu daerah dengan mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita. Suatu daerah harus menjunjung tinggi bidang pendidikan dan kesehatan, apabila bidang tersebut semakin membaik maka akan meningkatkan potensi yang dimiliki suatu daerah dan kualitas manusia semakin meningkat.

Pembangunan manusia pada dasarnya memiliki empat komponen utama, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*),

kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Apabila peningkatan dari keempat komponen tersebut berjalan dengan maksimal, maka pembangunan manusia akan berhasil dengan baik yang dicirikan oleh peran manusia sebagai agen pembangunan yang efektif (Feriyanto, 2014).

Dalam Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan dalam mengukur besar Indeks Pembangunan Manusia suatu negara, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Komponen pembentukan Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015.

Berdasarkan Gambar 2.3. merupakan pembentukan IPM dengan menggunakan metode baru. Indikator angka harapan hidup digunakan untuk mengukur tingkat umur panjang dan hidup sehat yang termasuk dalam kategori indeks kesehatan, sedangkan pengetahuan diukur menggunakan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang termasuk dalam kategori indeks pendidikan, untuk standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang termasuk dalam kategori indeks pengeluaran.

2.2.3. Tingkat Kemiskinan

Menurut *World Bank*, kemiskinan merupakan kehilangan kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses sumber daya yang tersedia dan diukur melalui jumlah pendapatan atau pengeluaran seseorang. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan atau kekurangan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan perbandingan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi seseorang setiap bulannya. Berbeda dengan dengan kemiskinan, penduduk miskin merupakan penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan. Menurut Kuncoro (2010), kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan kebutuhan untuk hidup

Dalam pembangunan terdapat upaya untuk mengalokasikan sumber

daya agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, karena adanya keadaan masyarakat yang beragam maka terdapat masyarakat yang miskin. Menurut Soebagyo (2016) penyebab kemiskinan dibagi menjadi lima, yaitu:

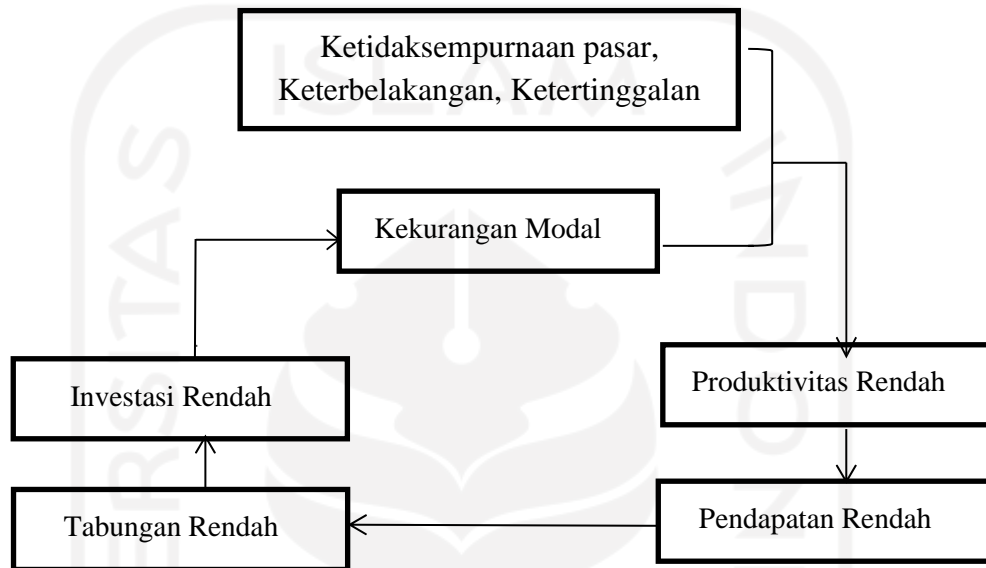
1. Penyebab individual yaitu kemiskinan sebagai akibat dari perilaku dan kemampuan diri seseorang.
2. Penyebab keluarga yaitu hubungan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
3. Penyebab sub-budaya (*subcultural*) yaitu kemiskinan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab agensi yaitu bahwa kemiskinan sebagai akibat dari perbuatan orang lain.
5. Penyebab struktural yaitu bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan.

Konsep lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pertama kali dikenalkan oleh Ragnar Nurkse 1953 yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*”. Lingkaran kemiskinan merupakan suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan kondisi di mana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Salah satu faktor penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan

adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal (Arsyad, 2010). Lingkaran setan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Lingkaran kemiskinan



Sumber: Nurkse dalam Kuncoro, 2010

Berdasarkan Gambar 2.4 dapat diketahui bahwa tidak adanya pembangunan yang dilakukan pada masa lalu bukan penyebab utama terjadinya kemiskinan pada saat ini, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa yang akan datang. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal akan menyebabkan rendahnya produktivitas. Apabila produktivitas rendah maka akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Sehingga tabungan dan investasi menjadi rendah. Rendahnya investasi akan mengakibatkan pada keterbelakangan.

Secara umum ukuran kemiskinan terdapat dua macam, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah

mengukur kemiskinan menggunakan garis kemiskinan, sedangkan mengukur kemiskinan tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Kuncoro, 2010):

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya kemiskinan sering dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimum yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan. Apabila pendapatan tidak mencukupi kebutuhan pokok, maka seseorang dapat dikatakan miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar kehidupan yang telah ditetapkan masyarakat setempat, meski pun pendapatan seseorang sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, namun pendapatan orang tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya. Sehingga orang tersebut masih tergolong dalam kategori miskin.

2.2.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan untuk memberikan kelulusan daerah tertentu dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adanya pendapatan asli daerah ini

digunakan untuk dana pembangunan yang dilakukan sebagai bentuk pemerataan pembangunan ekonomi, sehingga tidak menghambat proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk upaya melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Apabila komposisi pendapatan asli daerah semakin besar, maka kemampuan pemerintah daerah untuk menggunakan pendapatan daerah juga memiliki tanggung jawab lebih besar. Sebaliknya apabila semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah memiliki dampak yang dirasakan masyarakat yaitu kelancaran pembangunan berkelanjutan, yang meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya yang digunakan masyarakat secara umum dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia dengan Disparitas Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia dari sejumlah komponen dasar yang berupa kualitas hidup khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan (*Badan Pusat Statistik*).

Menurut Becker (dalam Hartini, 2017) hubungan IPM dengan disparitas pendapatan adalah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang baik menjadi peran yang sangat penting. Apabila semakin tinggi pendidikan formal, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal ini sesuai dengan teori *human capital*, yaitu bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menurunkan disparitas pendapatan. Jika setiap individu memiliki pendapatan yang tinggi karena pendidikan lebih tinggi, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan dan dapat menurunkan disparitas pendapatan. Namun, apabila IPM berpengaruh positif maka hal ini dapat disebabkan oleh pembangunan manusia yang masih terpusat di daerah perkotaan sehingga meningkatnya IPM diikuti dengan meningkatnya disparitas.

2.2.6. Tingkat Kemiskinan dengan Disparitas Pendapatan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang lebih layak, baik makanan maupun non makanan. Pengeluaran kebutuhan makanan yang diperlukan per orang setara dengan 2100 kalori per hari dan kebutuhan non makanan yaitu terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan,

transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya (*Badan Pusat Statistik*).

Hubungan tingkat kemiskinan dengan disparitas pendapatan merupakan satu unsur yang tidak dapat dipisahkan. Terjadinya kemiskinan diakibatkan karena adanya disparitas di suatu daerah. Di mana pendapatannya hanya dapat dinikmati oleh sebagian penduduk dan penduduk lainnya hanya mendapatkan porsi yang kecil bahkan ada yang tidak mendapatkannya (Andiny & Mandasari, 2017). Keterkaitan kemiskinan dengan disparitas pendapatan akan berpengaruh positif, di mana ketika tingkat kemiskinan meningkat maka disparitas pendapatan akan meningkat.

2.2.7. Pendapatan Asli Daerah dengan Disparitas Pendapatan

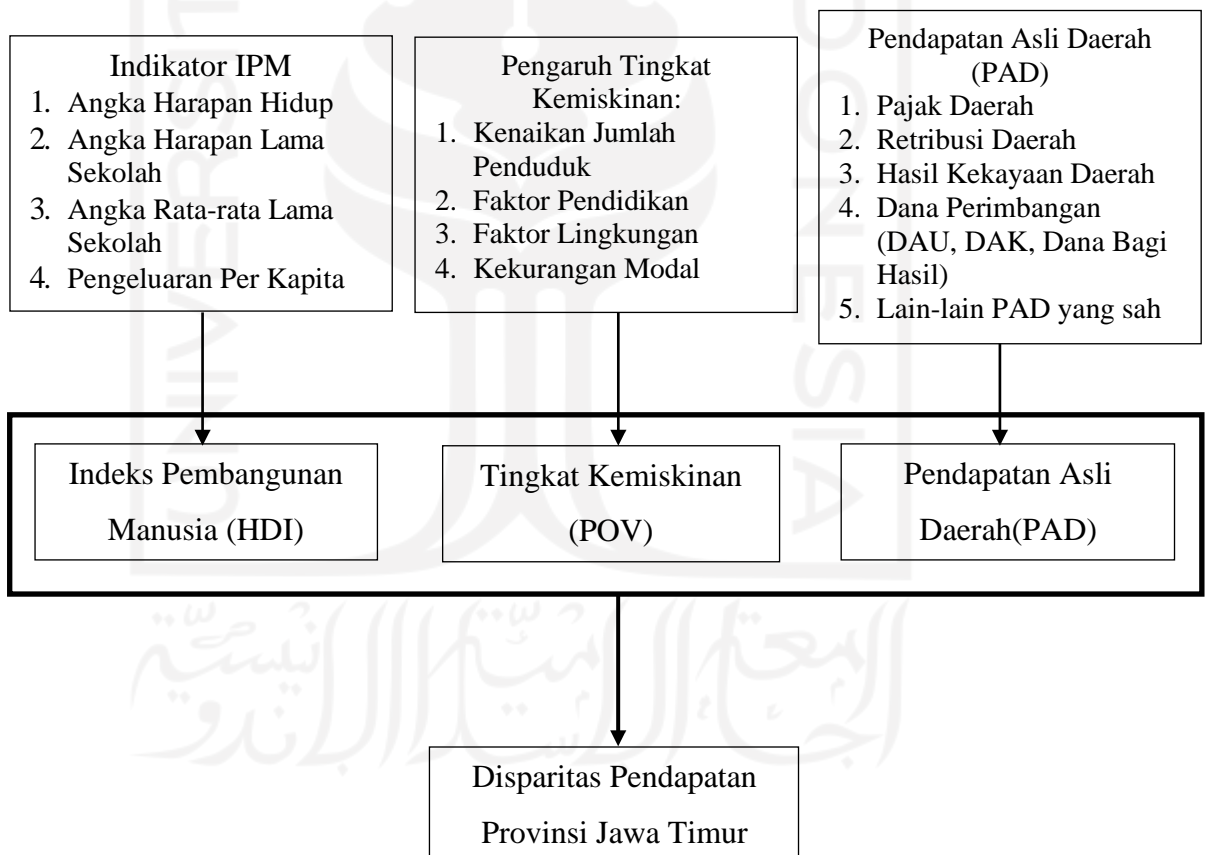
Pendapatan asli daerah memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan serta pembiayaan pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah. Meningkatnya angka pendapatan asli daerah diharapkan dapat menurunkan terjadinya ketimpangan pembangunan yang akan terus semakin besar antar wilayah. Menurut data badan pusat statistik, pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akibat dari kenaikan pendapatan asli daerah ini berpengaruh positif terhadap masing masing daerah namun ketimpangan yang terjadi pada masing masing daerah masih sangat terlihat perbedaanya. Untuk mengatasi masalah ketimpangan maka diperlukan adanya perimbangan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. Sehingga

setiap daerah dapat melakukan pembangunan berkelanjutan guna memenuhi fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis merupakan pola pikir teori yang didasarkan pada teori-teori yang dibahas serta dikaitkan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. Sebagai penjelasan pemikiran dalam penelitian ini, berikut gambar kerangka pemikiran yang skematis:

Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran



Penelitian ini menggunakan variabel dependen Disparitas Pendapatan, sedangkan variabel independennya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, dan Pendapatan Asli Daerah dengan mengambil sampel yakni seluruh kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten/kota. Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan adalah indikator yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia tingkat kemiskinan menjelaskan faktor yang mempengaruhi dan Pendapatan Asli Daerah menjelaskan sumber-sumber pendapatan pada suatu daerah tertentu.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan berbagai teori dan penelitian sebelumnya, diformulasikan hipotesis-hipotesis sebagai berikut :

- a. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
- b. Diduga Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
- c. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Data *time series* yang diambil adalah data pada Provinsi Jawa Timur tahun 2014 hingga tahun 2019 dan data *cross section* yang mencakup 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau merupakan data yang sudah diolah, data sekunder yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber dari hasil penelitian dan laporan yang dibuat oleh instansi tertentu seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dan lain lain. Data panel adalah sekumpulan data individual yang diteliti selama ruang waktu tertentu.

3.3. Definisi Operasional Variabel

1. Disparitas pendapatan merupakan fenomena yang terjadi ketika tidak meratanya hasil dari pembangunan suatu wilayah daerah ataupun suatu negara baik yang diterima oleh masing-masing individu atau dari kepemilikan faktor produksi yang ada pada kalangan penduduk yang diukur melalui indeks gini. Dalam mengetahui presentase data indeks gini dengan menggunakan kategori nilai yang menunjukkan angka 0 hingga 1, yang diambil dari tahun 2014 hingga tahun 2019, data tersebut diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur.

2. Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat pengukur perbandingan dari pencapaian sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia khususnya pendidikan, kesehatan, pendapatan, harapan hidup, angka melek huruf serta standar hidup. Apabila suatu negara dalam pencapaian sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia meningkat maka akan meningkatkan potensi yang dimiliki pada suatu daerah. Untuk mengategorikan suatu negara termasuk dalam negara maju, negara berkembang serta pengukur kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup adalah dengan menggunakan IPM. Data IPM (%) diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019
3. Tingkat Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup yang lebih layak, baik makanan maupun non makanan. Pengeluaran kebutuhan makanan yang diperlukan per orang setara dengan 2100 kalori per hari dan kebutuhan non makanan yaitu terdiri dari, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya (Badan Pusat Statistik). Data tingkat kemiskinan diukur dengan satuan persen (%). Data tingkat kemiskinan diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019
4. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang didapatkan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah (Sumber : BPKAD). Data PAD dengan satuan persen(%) tersebut diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) pada tahun 2014-2019. Data satuan persen(%) diperoleh dari perbandingan antara realisasi pendapatan yang diterima dengan realisasi anggaran.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan menggunakan metode data panel untuk mengolah data menggunakan program aplikasi Eviews.

3.4.2. Model Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut Ordinary Least Square (OLS). Maka dapat diperoleh persamaan regresinya adalah :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_{1it} X_{1it} + \beta_{2it} X_{2it} + \beta_{3it} X_{3it} + U_{it}$$

Keterangan :

Y = Ketimpangan Distribusi Pendapatan (%)

X₁ = Indeks Pembangunan Manusia (%)

X₂ = Tingkat Kemiskinan (%)

X₃ = Pendapatan Asli Daerah (%)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien variabel independen

β_0 = Efek grup/individu dari unit cross section ke-i

i = Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

t = Waktu (tahun 2014-2019)

U_t = Variabel pengganggu

Model analisis regresi data panel terdapat tiga model pendekatan dan langkah langkahnya untuk melakukan regresi antara lain sebagai berikut:

1. Common Effect Models (CEM)

Model Common Effect merupakan teknik estimasi regresi model panel data sederhana dengan mengkombinasikan antara time series dan cross section. Model common Effect tidak memperhatikan individu maupun dimensi waktu, maka dapat diasumsikan bahwa perilaku data suatu subjek penelitian akan sama berbagai kurun waktu.

2. Fixed Effect Models (FEM)

Model Fixed Effect merupakan suatu model panel data dimana heterogenitas antar-individu (individual-specific) memiliki hubungan dengan x . Dalam pembahasan lainnya model ini diasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat di akomodasi dari perbedaan intersepnya. Dalam ini pula untuk mendapatkan parameter β_0 bisa juga menggunakan metode transformasi data dengan cara mendapatkan deviasi model regresi dari rata-rata model regresi tersebut. Metode ini di anggap lebih menarik karena perlu untuk memasukan banyak regresor (variabel dummy) seperti model LSDV (Least Square Dummy Variable).

3. Random Effect Models (REM)

Model Random Effect mengasumsikan α_i sebagai variabel random

dengan mean α_0 , maka intersep mampu di asumsikan menjadi $\alpha_1 = \alpha_i + e_i$, yang mana e_i adalah eror random yang memiliki mean 0 serta varian e_i tidak secara langsung dapat di observasikan atau dapat disebut juga variabel laten. Persamaan di model REM ini sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_{1it} X_{1it} + \beta_{2it} X_{2it} + \beta_{3it} X_{3it} + U_{it}$$

Dilakukan beberapa uji untuk memilih pendekatan estimasi yang tepat serta mendapatkan hasil regresi yang baik dalam menentukan estimasi model regresi data panel.

3.4.3. Uji Pemilihan Model

Metode yang ditawarkan dalam regresi data panel dapat dipilih dengan beberapa uji yang tepat, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan sebagai berikut (Rimbani, 2016):

1. Interpretasi R²

Uji R² mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variabel independen. Besarnya derajat determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika uji derajat determinasi mendekati 1, maka semakin kuat pengaruh variabel tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara Common atau Pooled dan Fixed Effect yang akan digunakan

dalam mengestimasi data panel. Uji Chow memiliki hipotesis dalam pengujiannya, yaitu:

H_0 : model Common atau Pooled lebih baik, apabila nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada α 5%.

H_a : model Fixed Effect lebih baik, apabila nilai probabilitas F statistiknya signifikan pada α 5%.

H_0 diterima apabila $p\text{-value} > \alpha$

H_a diterima apabila $p\text{-value} \leq \alpha$

3. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Uji Hausman memiliki hipotesis dalam pengujiannya, yaitu :

H_0 : model Random Effect lebih baik, apabila nilai chi-square tidak signifikan pada α 5%.

H_a : model Fixed Effect lebih baik, apabila nilai chi-square signifikan pada α 5%.

H_0 diterima apabila $p\text{-value} > \alpha$

H_a diterima apabila $p\text{-value} \leq \alpha$

4. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat tingkat signifikansi dari setiap variabel independen apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dilihat dengan probabilitas masing-masing variabel independen apakah lebih besar atau lebih kecil dari alpha (α) = 0,05 atau (α) = 5%. Adapun hipotesis uji t sebagai berikut:

H_0 : variabel independen ke-i tidak memiliki pengaruh signifikan

H_a : variabel independen ke-i memiliki pengaruh signifikan

H_0 diterima apabila $p\text{-value} > \alpha$

H_a diterima apabila $p\text{-value} \leq \alpha$

5. Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika F-Statistik $> \alpha$ (0.05), maka H_0 diterima sehingga variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika prob F-Statistik $< \alpha$ (0.05), maka H_0 ditolak sehingga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

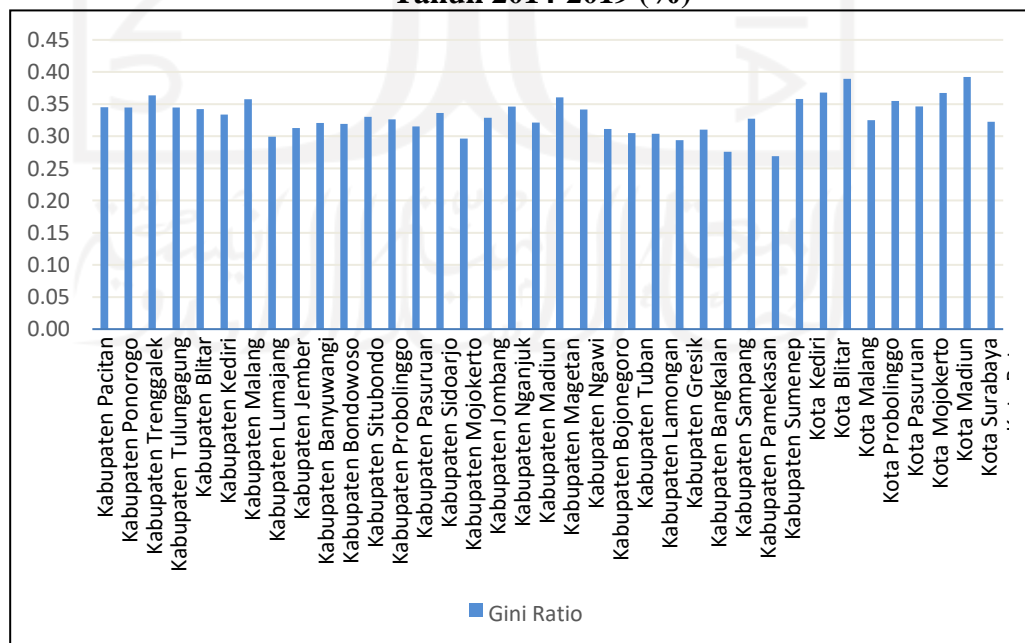
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Indeks Gini dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel terikat yang merupakan nilai rasio untuk mengukur Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu pengamatan yaitu antara tahun 2014-2019. Disparitas Pendapatan merupakan suatu kondisi dimana tidak meratanya pendapatan yang diterima antara suatu daerah dengan daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Berikut ini adalah grafik rata-rata indeks gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yang dapat dilihat pada Grafik 4.1.

Grafik 4.1.
Rata-rata Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019 (%)



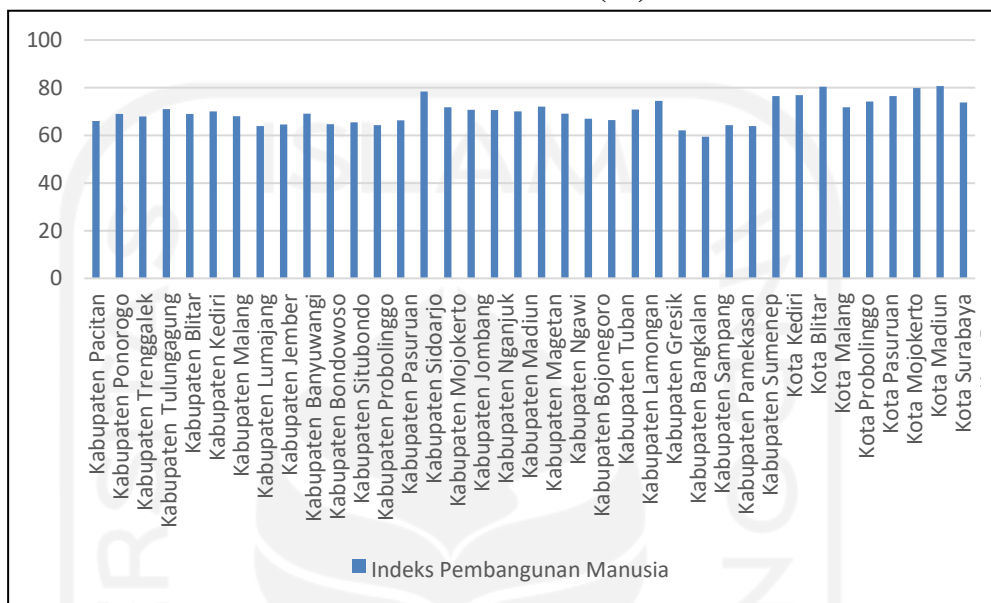
Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*, diolah (2020).

Berdasarkan grafik 4.1 diatas dapat diketahui perkembangan rata-rata indeks gini di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019 tertinggi berada di Kota Surabaya dan Kota Malang sebesar 0,39%. Nilai yang tinggi ini disebabkan oleh pendapatan yang diterima masyarakat belum merata dan tidak digunakan secara produktif oleh masyarakat tertentu. Urutan kedua berada di Kota Blitar dan Kota Madiun yaitu sebesar 0,37%. Sedangkan daerah dengan rata-rata indeks gini terendah yaitu Kabupaten Sumenep sebesar 0,27%. Rata-rata nilai *Gini Ratio* Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014-2019 mengalami perubahan secara angka naik maupun turun. Rata-rata nilai tertinggi sebesar 0,39% dan rata-rata nilai terendah sebesar 0,27%.

2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam melihat tingkat kualitas hidup manusia yang meliputi kemampuan dalam mengakses pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Semakin tinggi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka tingkat kualitas sumber daya manusianya akan semakin baik. Berikut ini adalah grafik rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yang dapat dilihat pada Grafik 4.2.

Grafik 4.2.
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019 (%)



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*, diolah (2020).

Berdasarkan grafik 4.2. terlihat bahwa perkembangan rata-rata IPM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019 tertinggi berada di Kota Surabaya sebesar 80,63%. Urutan kedua yaitu Kota Malang sebesar 80,39%, sedangkan daerah dengan rata-rata IPM terendah yaitu Kabupaten Sampang sebesar 55,51%.

Tingginya angka rata-rata IPM di Kota Surabaya menunjukkan bahwa Kota Surabaya merupakan kota yang paling unggul dalam mengelola sumber daya manusia dan akses pembangunan lainnya. Hal ini disebabkan oleh Kota Surabaya yang menjadi pusat perekonomian, pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun wisata. Selain itu, akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan lebih mudah dan relatif lengkap sehingga masyarakat dapat memanfaatkan akses sarana dan prasarana dengan baik.

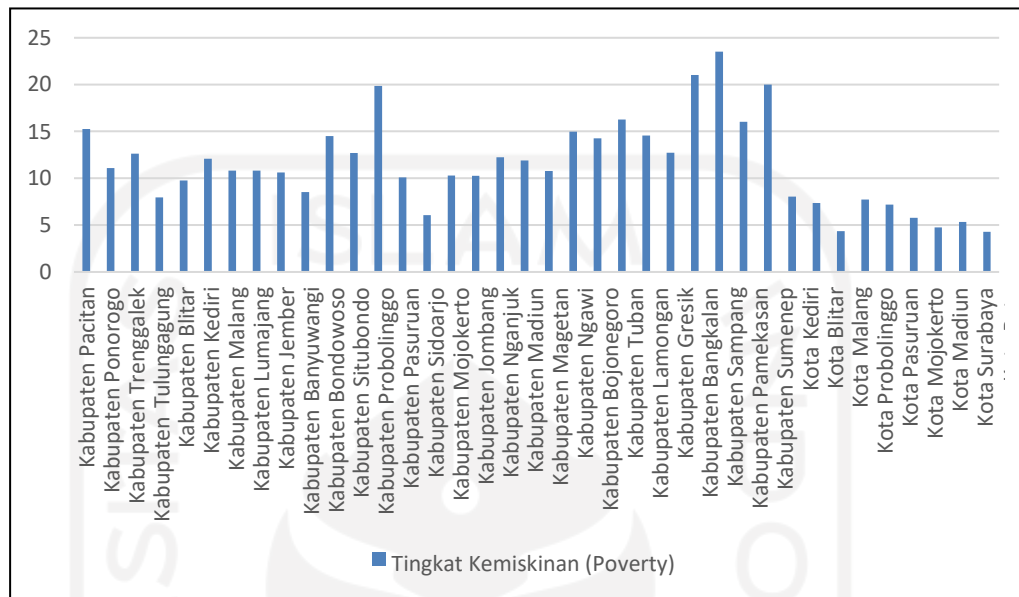
Timbulnya kesadaran masyarakat Surabaya dalam pola hidup sehat cukup tinggi yang mendukung naiknya usia harapan hidup.

Tingginya angka IPM di Kota Surabaya ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Sampang yang angka IPM masih rendah, penyebabnya salah satunya adalah pemerintah belum mampu mengelola pemerintahannya dengan baik, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah sehingga menyebabkan masyarakat masih menggunakan fasilitas tersebut kurang maksimal.

3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan suatu individu untuk memenuhi kebutuhan dasar baik primer maupun sekunder untuk hidup yang lebih layak. Berikut ini adalah grafik rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yang dapat dilihat pada Grafik 4.3.

Grafik 4.3.
Rata-rata Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019 (%)



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*, diolah (2020).

Berdasarkan grafik 4.3. diatas, diketahui bahwa perkembangan rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019 tertinggi berada di Kabupaten Sampang sebesar 23,51%. Urutan kedua yaitu Kabupaten Bangkalan sebesar 21,03%, sedangkan daerah dengan rata-rata tingkat kemiskinan terendah yaitu Kota Batu sebesar 4,30%.

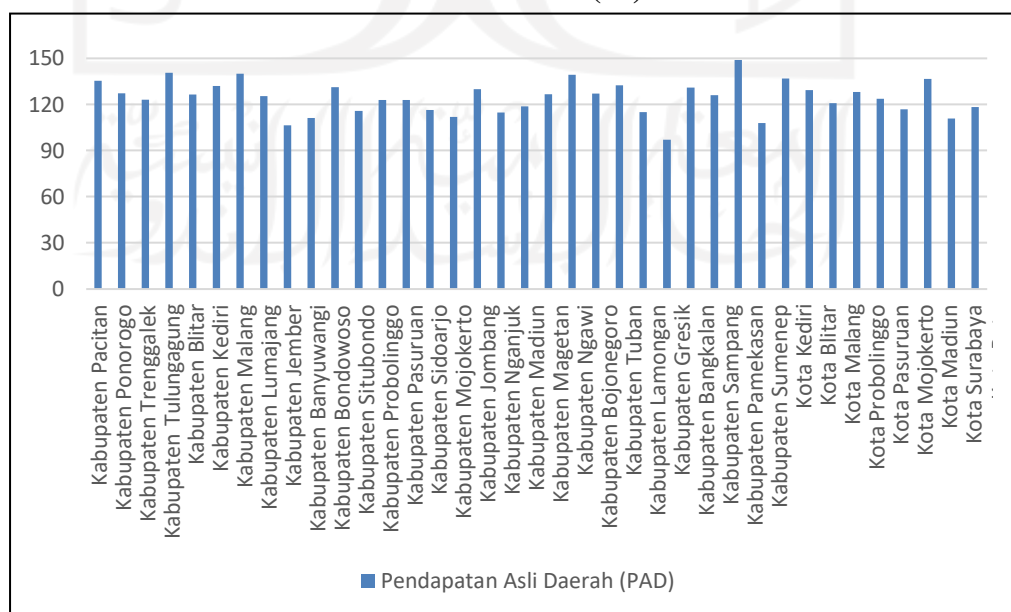
Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang ini disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya mutu Pendidikan. Penduduk miskin hanya berkecimbung pada sektor pertanian. Sementara pertanian di Kabupaten Sampang sebagian besar masih menggunakan dan mengandalkan sawah tadah hujan. Kurangnya kesadaran akan mutu Pendidikan juga mempengaruhi masyarakat di Kabupaten Sampang yang tergolong penduduk miskin, hal ini disebabkan banyaknya

masyarakat yang tidak melanjutkan Pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas. Masyarakat lebih memilih putus sekolah untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikannya. Masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dianggap miskin yang disebabkan pendapatan per kapitanya berada dibawah standar. Sedangkan kondisi ini berbanding terbalik dengan Kota Malang, rendahnya tingkat kemiskinan disebabkan oleh pendidikan dan pola hidup masyarakat yang tertata dengan rapi. Selain itu pemerintah kota Malang juga rutin memberikan pelatihan UMKM kepada masyarakat setempat, dengan memberikan ilmu tentang cara pembuatan produk, penjualan produk dengan baik, karena UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Grafik 4.4.

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (%)



Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS)*, diolah (2020).

Berdasarkan grafik 4.4. diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan rata-rata Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2019 tertinggi berada di Kabupaten Pamekasan sebesar 148,96%. Urutan kedua yaitu Kabupaten Tulungagung sebesar 140,64%, sedangkan daerah dengan rata-rata Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Kabupaten Gresik sebesar 97,17%.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kandungan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia pada daerah. Tujuan dari adanya Pendapatan Asli Daerah untuk memberikan keleluasaan kepada setiap masing-masing daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk dilakukan supaya setiap daerah dapat berkembang dengan baik secara ekonomi maupun sosial. Harapan dari pemerataan pembangunan adalah agar tidak terjadi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat.

Kemampuan yang dimiliki masing-masing daerah dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing tidak sama, sehingga hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat adalah mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Tujuan dari Penerimaan dana perimbangan digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di masing masing. Untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi di setiap daerah, pemerintah daerah diharapkan

tidak bergantung terhadap dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Apabila pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah tersebut rendah.

Namun tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dikarenakan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Dampak dari perbedaan ini adalah terjadinya ketimpangan sumber pendanaan antar daerah dimana daerah yang kaya akan potensi dan sumber daya memiliki sumber pendanaan yang lebih besar dibanding daerah yang miskin akan potensi daerahnya.

4.2. Analisis Deskriptif

Berikut adalah hasil analisis deskriptif yang diolah dengan aplikasi Eviews 9. Analisis deskriptif ini akan dikemukakan beberapa hal seperti Rata-rata (*Mean*), Nilai Tengah (*Median*), Standar deviasi, dan lain-lain.

Tabel 4.1. Analisis Deskriptif

	GR	HDI	POV	PAD
Mean	0.331641	70.04776	11.48740	124.3749
Median	0.330000	69.65500	11.03392	120.8550
Maximum	0.421250	82.22000	25.80000	204.6300
Minimum	0.230000	56.98000	3.810000	77.35000
Std. Dev.	0.038075	5.372534	4.726518	20.29966
Skewness	-0.003250	0.285647	0.632981	0.635430
Kurtosis	3.026916	2.471660	3.123187	3.592120
Jarque-Bera	0.007284	5.752446	15.36944	18.67408
Probability	0.996365	0.056347	0.000460	0.000088
Sum	75.61416	15970.89	2619.127	28357.47
Sum Sq. Dev.	0.329084	6552.157	5071.174	93541.30
Observations	228	228	228	228

Dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif diatas, nilai mean dari variabel GR (*Gini Ratio*) sebesar 0.33%, lalu nilai median sebesar 0.33%, nilai maximum sebesar 0.42% dan nilai minimum sebesar 0.23%, dan nilai

standart deviasinya sebesar 0.038075. Nilai mean dari variabel HDI (Indeks Pembangunan Manusia) sebesar 70.04%, lalu nilai median sebesar 69.65%, nilai maximum sebesar 82.22% nilai minimum 56.98%, dan nilai standart deviasinya sebesar 5.372534. Nilai mean dari variabel POV (Tingkat Kemiskinan) adalah sebesar 11.48%, lalu nilai median sebesar 11.03%, nilai maximum sebesar 25.80% dan nilai minimum sebesar 3.81%, nilai standart deviasinya sebesar 4.726518. Nilai mean dari variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah sebesar 124.3%, lalu nilai median sebesar 120.8%, nilai maximum sebesar 204.6% dan nilai minimum sebesar 77.3%, nilai standart deviasinya sebesar 20.2%.

4.3. Hasil dan Analisis Data

4.3.1. Metode *Common Effect Model*

Tabel 4.2 Hasil Regresi *Common Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.105360	0.061680	1.708168	0.0890
HDI	0.003011	0.000723	4.164266	0.0000
POV	-0.000971	0.000816	-1.191022	0.2349
PAD	0.000213	0.000109	1.964333	0.0507
R-squared	0.272436	Mean dependent var		0.331641
Adjusted R-squared	0.262691	S.D. dependent var		0.038075
S.E. of regression	0.032694	Akaike info criterion		-3.985876
Sum squared resid	0.239430	Schwarz criterion		-3.925712
Log likelihood	458.3898	Hannan-Quinn criter.		-3.961602
F-statistic	27.95885	Durbin-Watson stat		1.218504
Prob(F-statistic)	0.000000			

4.3.2. Metode *Fixed Effect Model*

Tabel 4.3 Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.626383	0.229284	-2.731906	0.0069
HDI	0.011801	0.002739	4.308220	0.0000
POV	0.012503	0.003777	3.310333	0.0011
PAD	-9.81E-05	0.000124	-0.789133	0.4310

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variabls)

R-squared	0.579787	Mean dependent var	0.331641
Adjusted R-squared	0.489902	S.D. dependent var	0.038075
S.E. of regression	0.027194	Akaike info criterion	-4.210255
Sum squared resid	0.138285	Schwarz criterion	-3.593574
Log likelihood	520.9690	Hannan-Quinn criter.	-3.961443
F-statistic	6.450304	Durbin-Watson stat	1.797166
Prob(F-statistic)	0.000000		

4.3.3. Metode *Random Effect Model*

Tabel 4.4 Hasil Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.049651	0.094323	0.526389	0.5991
HDI	0.003968	0.001127	3.521944	0.0005
POV	0.000220	0.001290	0.170452	0.8648
PAD	1.19E-05	0.000105	0.113442	0.9098
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.015658	0.3202
Period random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.022816	0.6798
Weighted Statistics				
R-squared	0.138703	Mean dependent var		0.169555
Adjusted R-squared	0.127168	S.D. dependent var		0.029746
S.E. of regression	0.027790	Sum squared resid		0.172992
F-statistic	12.02434	Durbin-Watson stat		1.572383
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.252705	Mean dependent var		0.331641
Sum squared resid	0.245923	Durbin-Watson stat		1.106076

4.4. Pemilihan Model Terbaik

1. Uji Chow

Pada uji chow melibatkan pengujian yang membandingkan antara model estimasi *common effect* dengan *fixed effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : model estimasi *common effect*

H_a : model estimasi *fixed effect*

Tabel 4.5
Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.696622	(37,187)	0.0000
Cross-section Chi-square	125.158370	37	0.0000

Sumber: Hasil output regresi data panel menggunakan E-Views8

Berdasarkan hasil pengujian antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* diperoleh nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 kurang dari alpha ($0,0000 < 0,05$) maka menolak H_0 . Artinya lebih baik memilih model estimasi *Fixed Effect Models*.

2. Uji Hausman

Pada uji hausman melibatkan pengujian yang membandingkan antara model estimasi *random effect* dengan *fixed effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : memilih model estimasi *random effect*

H_a : memilih model estimasi *fixed effect*

Tabel 4.6
Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section F	27.276670	3	0.0000

Sumber: Hasil output regresi data panel menggunakan E-Views8

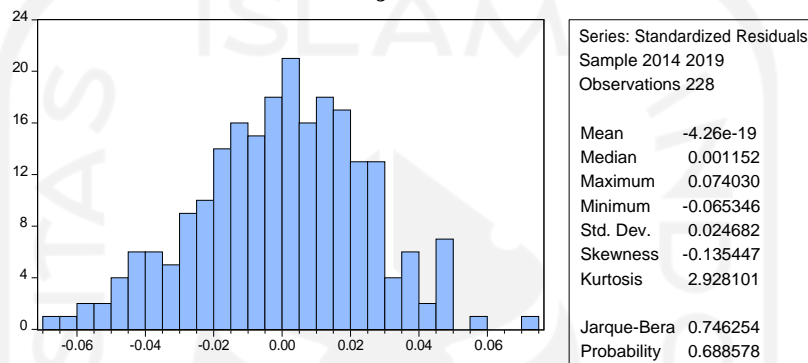
Berdasarkan hasil pengujian antara *Random Effect* dan *Fixed Effect* diperoleh nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 kurang dari alpha ($0,0000 < 0,05$) sehingga menolak H_0 . Artinya model terbaik adalah *Fixed Effect Models*. Dikarenakan hasil memilih model

estimasi *Fixed Effect Models* maka pengujian *Lagrange Multiple* tidak perlu dilakukan.

4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1. Uji Normalitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan Uji Normalitas yang telah dilakukan diatas, diketahui nilai Probabilitynya adalah sebesar 0,314808 dan menunjukkan $0,314808 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Ini menunjukkan bahwa probabilitas gagal menolak H_0 , artinya residual data berdistribusi normal.

4.6. Hasil Uji Statistik

Berdasarkan pengujian *Chow Test* dan *Hausman Test* menunjukkan hasil bahwa model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect*. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Dipsparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur” dengan menggunakan *Fixed Effect Models*. Hasil uji dengan metode ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8**Hasil Regresi dengan Metode *Fixed Effect Model* (FEM)**

$$\text{GINI}_{it} = -0.626383 + 0.011801 \text{HDI}_{it} + 0.012503 \text{POV}_{it} - 9.81\text{E-}05 \text{PAD}_{it} + e_{it}$$

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.626383	0.229284	-2.731906	0.0069
HDI	0.011801	0.002739	4.308220	0.0000
POV	0.012503	0.003777	3.310333	0.0011
PAD	-9.81E-05	0.000124	-0.789133	0.4310
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variabls)				
R-squared	0.579787	Mean dependent var	0.331641	
Adjusted R-squared	0.489902	S.D. dependent var	0.038075	
S.E. of regression	0.027194	Akaike info criterion	-4.210255	
Sum squared resid	0.138285	Schwarz criterion	-3.593574	
Log likelihood	520.9690	Hannan-Quinn criter.	-3.961443	
F-statistic	6.450304	Durbin-Watson stat	1.925271	
Prob(F-statistic)	0.000000			

4.6.1. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan dari hasil tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa *Fixed Effect* model diinterpretasikan oleh besarnya pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap variabel *Gini Ratio*.

Hasil perhitungan menyatakan bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0.579787 yang artinya Variabel *Gini Ratio* dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 57.97% dan sisanya sebesar 42.03% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.6.2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan dari hasil tabel 4.8 pada model *fixed effect*, diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar $0.000000 < \alpha 5\%$ maka menolak H_0 . Artinya, variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Gini Ratio*.

4.6.3. Uji Signifikansi (Uji T)

Tabel 4.9
Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Variabel Independen

Variabel	sig. t	Kriteria	Kesimpulan
HDI	0,0000	$< 0,05$	Memiliki pengaruh signifikan
POV	0,0011	$< 0,05$	Memiliki pengaruh signifikan
PAD	0.4310	$> 0,05$	Tidak memiliki pengaruh signifikan

Sumber: E-Views8

Hasil uji t di tabel 4.8 diatas dengan model *fixed effect* yakni sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 > 0$$

Koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah 0.011801 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 yang mana $0.0000 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Gini Ratio*.

2. Tingkat Kemiskinan

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 > 0$$

Koefisien variabel Tingkat Kemiskinan adalah 0.012503 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0011 yang mana $0.0011 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Gini Ratio*.

3. Pendapatan Asli Daerah

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

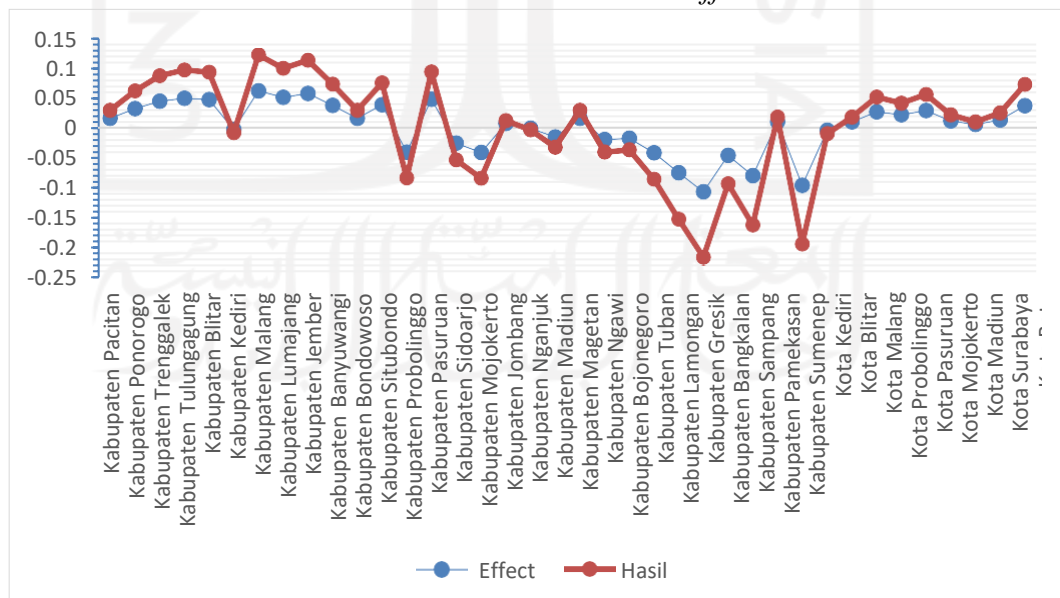
$$H_a : \beta_3 > 0$$

Koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah adalah $-9.81E-05$ sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.4310 yang mana $0.4310 > 0.05$ ($\alpha = 5\%$). Sehingga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Gini Ratio*.

4.7. Interpretasi dan Pembahasan

4.7.1. Analisis Cross Section Effect

Grafik 4.5. *Cross Section Effect*



Berdasarkan grafik 4.5. diatas, menunjukkan bahwa dampak hasil

pengujian analisis melalui metode *Fixed Effect Models* dari data 38

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mempengaruhi hasil penjumlahan antara koefisien yang bersifat konstan. Apabila effect yang didapatkan tinggi maka hasil penjumlahannya pun juga akan tinggi mengikuti effect sehingga terdapat hubungan yang selaras atau positif antara keduanya. Sebaliknya, apabila effect yang diperoleh rendah maka hasil penjumlahan juga akan rendah. Sebagai contoh, di Kabupaten Malang memiliki Effect yang tinggi sehingga Hasil juga tinggi, sedangkan Kabupaten Gresik memiliki Effect rendah dan Hasil juga turut rendah.

4.7.2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil regresi data panel koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 0.011801 signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien ini menunjukkan bahwa jika Indeks Pembangunan Manusia meningkat 1 satuan dengan asumsi faktor lainnya tetap, maka *Gini Ratio* akan meningkat sebesar 0.011801%. Hal ini sesuai dengan hasil hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksana yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015.

Kenaikan IPM yang diikuti dengan kenaikan Disparitas Pendapatan ini disebabkan oleh ketersediaan fasilitas yang menunjang IPM seperti

pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih terpusat di daerah perkotaan.

Pada penelitian ini, terlihat bahwa IPM tertinggi berada di Kota Surabaya dan Kota Malang (Grafik 4.2). Dimana terdapat akses pendidikan dan kesehatan yang tinggi, sehingga menciptakan tenaga kerja yang tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita serta daya beli masyarakat. Daerah ini tentu menjadi pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi antar daerah menjadi tidak merata dan menyebabkan adanya Disparitas Pendapatan.

4.7.3. Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil regresi data panel koefisien variabel Tingkat Kemiskinan adalah 0.012503 signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Besarnya koefisien ini menunjukkan bahwa jika Tingkat Kemiskinan meningkat 1 satuan dengan asumsi faktor lainnya tetap, maka *Gini Ratio* akan meningkat sebesar 0.012503%. Hal ini sesuai dengan hasil hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif terhadap Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

Terjadinya kemiskinan diakibatkan karena adanya disparitas di suatu daerah. Dimana pendapatannya hanya dapat dinikmati oleh sebagian penduduk dan penduduk lainnya hanya mendapatkan porsi yang kecil bahkan ada yang tidak mendapatkannya (Andiny & Mandasari, 2017). Hal ini berarti bahwa meningkatnya tingkat kemiskinan, akan mempengaruhi Disparitas Pendapatan di daerah tersebut.

Pada penelitian ini, terlihat bahwa Tingkat Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Sampang (Grafik 4.3). Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten tersebut masih dijumpai sumber daya manusia yang rendah dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Kenaikan tingkat kemiskinan yang diikuti dengan kenaikan Disparitas Pendapatan disebabkan oleh masyarakat miskin masih tersentralisasi di pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah akses, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah pedesaan yang belum memadai sehingga menghambat penduduk sekitar untuk mendapatkan pendidikan, informasi serta pelayanan umum di bidang kesehatan maupun yang lainnya dengan baik.

4.7.4. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil regresi data panel koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah adalah $-9.81E-05$ negatif dan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini tidak sesuai dengan hasil hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurhuda, Muluk, & Prasetyo, 2013) yang mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.

Koefisien Pendapatan Asli Daerah yang ditunjukkan sebesar $-9.81E-$

05 membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar dan merata di Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjainya penurunan Disparitas Pendapatan. Ini dikarenakan kenaikan Pendapatan Asli Daerah dapat memicu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sehingga akan mengurangi Disparitas Pendapatan antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh mengenai pengujian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur 2014-2019, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia yang mengalami peningkatan secara terus menerus akan mendorong kenaikan Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan ketersediaan fasilitas yang menunjang IPM seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi hanya tersedia di daerah perkotaan, yang menyebabkan masyarakat yang tinggal di pedesaan belum dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. Naiknya IPM dibarengi dengan meningkatnya Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Dimana IPM tertinggi berada di Kota Surabaya yang memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang tinggi, sehingga menciptakan tenaga kerja yang tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita serta daya beli masyarakat. Daerah ini tentunya menjadi pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi antar daerah menjadi tidak merata dan menyebabkan adanya Disparitas Pendapatan.
2. Variabel Tingkat Kemiskinan yang mengalami peningkatan secara terus menerus akan mendorong kenaikan Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa

Timur. Tingkat Kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Sampang. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten tersebut masih dijumpai sumber daya manusia yang rendah dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Kenaikan tingkat kemiskinan yang diikuti dengan kenaikan Disparitas Pendapatan disebabkan oleh masyarakat miskin masih tersentralisasi di pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah akses, infrastruktur dan fasilitas publik di daerah pedesaan yang belum memadai sehingga menghambat penduduk sekitar untuk mendapatkan pendidikan, informasi serta pelayanan umum di bidang kesehatan maupun yang lainnya dengan baik.

3. Variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan tidak berpengaruh terhadap kenaikan Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah yang semakin besar dan merata di Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan disparitas antar daerah.

5.2. Saran dan Implikasi

1. Untuk menurunkan disparitas pendapatan dapat dilakukan dengan menaikkan IPM. Tersedianya fasilitas yang menunjang IPM seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan pembangunan manusia seperti kualitas

Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya pembangunan manusia secara merata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat mengurangi Disparitas Pendapatan antardaerah.

2. Kemiskinan yang masih dijumpai di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur disebabkan karena infrastruktur dan fasilitas publik di daerah pedesaan yang belum memadai. Sehingga masyarakat miskin masih tersentralisasi di daerah pedesaan. Dalam penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, oleh karena itu pembangunan yang merata hendaknya harus segera terealisasi sehingga tidak menimbulkan Disparitas antar daerah.
3. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah) yang digunakan sebagai APBD daerah untuk kegiatan atau program kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga Disparitas Pendapatan akan semakin menurun. Hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah adalah dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran membayar pajak, karena dengan membayar pajak akan menambah jumlah Pendapatan Asli Daerah dan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afina, Z. dan Suseno, D . 2017. Analisis Determinan Disparitas Pendapatan di Kawasan Purwomanggung Tahun 2009-2015. *Jurnal Analisis Ekonomi Pembangunan*.
- Andiny, Putri., dan Mandasari, P,. 2017. Analisis Pertumbuhan EKonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*. Vol. 1, No. 2.
- Arif, M. dan Wicaksani, R. 2017. Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. ISSN 2407-9189.
- Arsyad, lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ayu, D. F., Riani, W., dan Havis, M,. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2016; *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi*.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jawa Timur dalam angka 2014*. Surabaya : Badan Pusat Statistik.
- _____ (2015). *Jawa Timur dalam angka 2015*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- _____ (2016). *Jawa Timur dalam angka 2016*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- _____ (2017). *Jawa Timur dalam angka 2017*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- _____ (2018). *Jawa Timur dalam angka 2018*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- _____ (2019). *Jawa Timur dalam angka 2019*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- BPKAD. 2017. *Mengenal Pendapatan Asli Daerah*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Darzal. 2016. Analisis Disparitas Pendapatan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif pembiayaan dan pembangunan.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2014. PAD Jawa Timur dalam angka 2014. Surabaya: DJPK Kemenkeu.
- _____ (2015). PAD Jawa Timur dalam angka 2015. Surabaya: DJPK Kemenkeu.
- _____ (2016). PAD Jawa Timur dalam angka 2016. Surabaya: DJPK Kemenkeu
- _____ (2017). PAD Jawa Timur dalam angka 2017. Surabaya: DJPK Kemenkeu
- _____ (2018). PAD Jawa Timur dalam angka 2018. Surabaya: DJPK Kemenkeu
- _____ (2019). PAD Jawa Timur dalam angka 2019. Surabaya: DJPK Kemenkeu
- Fauzia, A dan Suseno, D. 2017. Disparitas Pendapatan di Kawasan Purwomanggung Tahun 2009-2015. Jurnal Analisis Ekonomi
- Feriyanto, Nur. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat..
- Hariani, E. (2019, April). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 3. doi:e-ISSN 2599-0705.
- Iswanto, Denny. 2015. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan EKonomi di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4. No. 1, Hal 24-25.
- Khusnah, L. 2015. Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2008-2013. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta:

UPP STIM YKPN.

- Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth And Income Inequality. *The American Economic Review*. Vol. XIV, Number 1.
- Nurhuda, R., Muluk, K., & Prasetyo, W. Y. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, Nomor 4, 110-119.
- Rahma, E. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.
- Rubairko, S, I., 2013. Analisis Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Saputri, W dan Suryowati, K. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gini Ratio di Provinsi Papua dengan Model Spasial Data Panel. *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi*.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soebagyo, Daryono. 2016. *Perekonomian Indonesia: Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi dan Kajian Empiris*. Sukoharjo: CV Jasmine.
- Soebagyo, Daryono., et al. 2019. Income Inequality and Covergence in Central Java Under Regional Autonomy. *International Journal of Economics and Management*. Vol. 13, Number 1.
- Sri Danawati, I. K. G., Bandesa dan Utama, M. S., 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Taharah, S. (n.d.). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015. Dspace UII.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tiara dan Shita. 2014. Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan* Vol. 16 No. 1, Hal 13-15.
- Todaro, Michael P., Dan Stephen C. Smith. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1.

Jakarta: Erlangga.

Yasa, I, K, O, A., 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.

Yuliani, Tutik. 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur. *Journal of Economics and Policy*, Vol. 7. No. 1. Hal 5-8.

World Bank. 2006. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*.



LAMPIRAN I : Data Penelitian

**Gini Ratio, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-
2019**

Kabupaten/Kota	Tahun	Gini Ratio (%)	HDI (%)	POV (%)	PAD(%)
Kabupaten Pacitan	2014	0,31	63,81	16,18	150,41
Kabupaten Pacitan	2015	0,33	64,92	16,68	141,33
Kabupaten Pacitan	2016	0,36	65,74	15,49	136,95
Kabupaten Pacitan	2017	0,32	66,51	15,42	145,25
Kabupaten Pacitan	2018	0,35	67,33	14,19	119,28
Kabupaten Pacitan	2019	0,40	68,16	13,67	119,67
Kabupaten Ponorogo	2014	0,31	67,4	11,53	155,11
Kabupaten Ponorogo	2015	0,36	68,16	11,91	118,87
Kabupaten Ponorogo	2016	0,36	68,93	11,75	112,88
Kabupaten Ponorogo	2017	0,34	69,26	11,39	136,91
Kabupaten Ponorogo	2018	0,35	69,91	10,36	122,55
Kabupaten Ponorogo	2019	0,35	70,56	9,64	117,48
Kabupaten Trenggalek	2014	0,31	66,16	13,10	121,77
Kabupaten Trenggalek	2015	0,37	67,25	13,39	125,11
Kabupaten Trenggalek	2016	0,39	67,78	13,24	128,1
Kabupaten Trenggalek	2017	0,35	68,1	12,96	143,94
Kabupaten Trenggalek	2018	0,39	68,71	12,02	117,49
Kabupaten Trenggalek	2019	0,37	69,46	10,98	101,77
Kabupaten Tulungagung	2014	0,31	69,49	8,75	151,6
Kabupaten Tulungagung	2015	0,36	70,07	8,57	145,37
Kabupaten Tulungagung	2016	0,37	70,82	8,23	142,45
Kabupaten Tulungagung	2017	0,35	71,24	8,04	167,64
Kabupaten Tulungagung	2018	0,37	71,99	7,27	126,13
Kabupaten Tulungagung	2019	0,30	72,62	6,74	110,65
Kabupaten Blitar	2014	0,3	66,88	10,22	139,79
Kabupaten Blitar	2015	0,33	68,13	9,97	122,44
Kabupaten Blitar	2016	0,34	68,88	9,88	114,8
Kabupaten Blitar	2017	0,37	69,33	9,80	149,45

Kabupaten Blitar	2018	0,38	69,93	9,72	112,33
Kabupaten Blitar	2019	0,33	70,57	8,94	120,41
Kabupaten Kediri	2014	0,31	68,44	12,77	155,29
Kabupaten Kediri	2015	0,34	68,91	12,91	115,13
Kabupaten Kediri	2016	0,38	69,87	12,72	116,22
Kabupaten Kediri	2017	0,34	70,47	12,25	183,3
Kabupaten Kediri	2018	0,33	71,07	11,31	105,32
Kabupaten Kediri	2019	0,30	71,85	10,42	117,08
Kabupaten Malang	2014	0,33	65,59	11,07	161,12
Kabupaten Malang	2015	0,38	66,63	11,53	138,63
Kabupaten Malang	2016	0,32	67,51	11,49	127,32
Kabupaten Malang	2017	0,35	68,47	11,04	174,37
Kabupaten Malang	2018	0,38	69,4	10,37	119,61
Kabupaten Malang	2019	0,38	70,35	9,47	118,6
Kabupaten Lumajang	2014	0,23	62,33	11,75	165,47
Kabupaten Lumajang	2015	0,29	63,02	11,52	124,87
Kabupaten Lumajang	2016	0,35	63,74	11,22	136,63
Kabupaten Lumajang	2017	0,31	64,23	10,87	127,33
Kabupaten Lumajang	2018	0,32	64,83	9,98	102,32
Kabupaten Lumajang	2019	0,30	65,33	9,49	95,37
Kabupaten Jember	2014	0,26	62,64	11,28	95,56
Kabupaten Jember	2015	0,33	63,04	11,22	90,91
Kabupaten Jember	2016	0,31	64,01	10,97	108,05
Kabupaten Jember	2017	0,34	64,96	11,00	136,64
Kabupaten Jember	2018	0,34	65,96	9,98	101,4
Kabupaten Jember	2019	0,30	66,69	9,25	105,86
Kabupaten Banyuwangi	2014	0,29	67,31	9,29	135,7
Kabupaten Banyuwangi	2015	0,34	68,08	9,17	139,33
Kabupaten Banyuwangi	2016	0,33	69	8,79	119,77
Kabupaten Banyuwangi	2017	0,34	69,64	8,64	100,08
Kabupaten Banyuwangi	2018	0,31	70,06	7,8	85,34
Kabupaten Banyuwangi	2019	0,31	70,6	7,52	86,71
Kabupaten Bondowoso	2014	0,27	63,43	14,76	158,73
Kabupaten Bondowoso	2015	0,32	63,95	14,96	130,12

Kabupaten Bondowoso	2016	0,35	64,52	15,00	127,99
Kabupaten Bondowoso	2017	0,32	64,75	14,54	149,04
Kabupaten Bondowoso	2018	0,35	65,27	14,39	109,02
Kabupaten Bondowoso	2019	0,30	66,09	13,33	113,04
Kabupaten Situbondo	2014	0,29	63,91	13,15	127,48
Kabupaten Situbondo	2015	0,33	64,53	13,63	117,9
Kabupaten Situbondo	2016	0,35	65,08	13,34	106,12
Kabupaten Situbondo	2017	0,33	65,68	13,05	134,11
Kabupaten Situbondo	2018	0,36	66,42	11,82	101,23
Kabupaten Situbondo	2019	0,32	67,09	11,2	108,13
Kabupaten Probolinggo	2014	0,32	63,04	20,44	152,62
Kabupaten Probolinggo	2015	0,3	63,83	20,82	126,58
Kabupaten Probolinggo	2016	0,31	64,12	20,98	109,87
Kabupaten Probolinggo	2017	0,36	64,28	20,52	137,49
Kabupaten Probolinggo	2018	0,34	64,85	18,71	106,19
Kabupaten Probolinggo	2019	0,33	65,6	17,76	105,12
Kabupaten Pasuruan	2014	0,28	64,35	10,86	142,03
Kabupaten Pasuruan	2015	0,32	65,04	10,72	128,41
Kabupaten Pasuruan	2016	0,32	65,71	10,57	106,26
Kabupaten Pasuruan	2017	0,34	66,69	10,34	152,32
Kabupaten Pasuruan	2018	0,32	67,41	9,45	107,29
Kabupaten Pasuruan	2019	0,31	68,29	8,68	101,17
Kabupaten Sidoarjo	2014	0,3	76,78	6,40	121,27
Kabupaten Sidoarjo	2015	0,35	77,43	6,44	116,16
Kabupaten Sidoarjo	2016	0,37	78,17	6,39	110,92
Kabupaten Sidoarjo	2017	0,34	78,7	6,23	127,61
Kabupaten Sidoarjo	2018	0,35	79,5	5,69	117,78
Kabupaten Sidoarjo	2019	0,31	80,05	5,32	105,42
Kabupaten Mojokerto	2014	0,27	70,22	10,56	118,19
Kabupaten Mojokerto	2015	0,31	70,85	10,57	103,74
Kabupaten Mojokerto	2016	0,3	71,38	10,61	108,18
Kabupaten Mojokerto	2017	0,32	72,36	10,19	114,74
Kabupaten Mojokerto	2018	0,31	72,64	10,08	115,06

Kabupaten Mojokerto	2019	0,27	73,53	9,75	110,76
Kabupaten Jombang	2014	0,32	69,07	10,80	147,78
Kabupaten Jombang	2015	0,32	69,59	10,79	142,1
Kabupaten Jombang	2016	0,34	70,03	10,70	120,88
Kabupaten Jombang	2017	0,34	70,88	10,48	151,34
Kabupaten Jombang	2018	0,32	71,86	9,56	108,98
Kabupaten Jombang	2019	0,33	72,85	9,22	108,55
Kabupaten Nganjuk	2014	0,3	69,59	13,14	127,28
Kabupaten Nganjuk	2015	0,35	69,9	12,69	121,23
Kabupaten Nganjuk	2016	0,36	70,5	12,25	115,04
Kabupaten Nganjuk	2017	0,33	70,69	11,98	107,76
Kabupaten Nganjuk	2018	0,31	71,23	12,11	109,75
Kabupaten Nganjuk	2019	0,42	71,71	11,24	107,44
Kabupaten Madiun	2014	0,28	68,6	12,04	120,83
Kabupaten Madiun	2015	0,32	69,39	12,54	116,28
Kabupaten Madiun	2016	0,34	69,67	12,69	108,05
Kabupaten Madiun	2017	0,32	70,27	12,28	135,15
Kabupaten Madiun	2018	0,33	71,01	11,42	118,07
Kabupaten Madiun	2019	0,33	71,69	10,54	114,3
Kabupaten Magetan	2014	0,32	70,29	11,80	125,19
Kabupaten Magetan	2015	0,34	71,39	11,35	133,97
Kabupaten Magetan	2016	0,37	71,94	11,03	113,59
Kabupaten Magetan	2017	0,39	72,6	10,48	144,77
Kabupaten Magetan	2018	0,38	72,91	10,31	118,81
Kabupaten Magetan	2019	0,36	73,49	9,61	123,15
Kabupaten Ngawi	2014	0,34	67,78	14,88	168,08
Kabupaten Ngawi	2015	0,34	68,32	15,61	137,75
Kabupaten Ngawi	2016	0,34	68,96	15,27	120,8
Kabupaten Ngawi	2017	0,34	69,27	14,91	165,29
Kabupaten Ngawi	2018	0,35	69,91	14,83	123,84
Kabupaten Ngawi	2019	0,34	70,41	14,39	120,89
Kabupaten Bojonegoro	2014	0,28	65,27	15,48	148,55
Kabupaten Bojonegoro	2015	0,32	66,17	15,71	128,43
Kabupaten Bojonegoro	2016	0,32	66,73	14,60	117,03
Kabupaten Bojonegoro	2017	0,29	67,28	14,34	136,23
Kabupaten Bojonegoro	2018	0,35	67,85	13,16	115,49
Kabupaten Bojonegoro	2019	0,31	68,75	12,38	116,31
Kabupaten Tuban	2014	0,24	64,58	16,64	141,87
Kabupaten Tuban	2015	0,29	65,52	17,08	132,58
Kabupaten Tuban	2016	0,33	66,19	17,14	121,22

Kabupaten Tuban	2017	0,31	66,77	16,87	151,88
Kabupaten Tuban	2018	0,36	67,43	15,31	117,02
Kabupaten Tuban	2019	0,30	68,37	14,58	130,53
Kabupaten Lamongan	2014	0,27	69,42	15,68	152,28
Kabupaten Lamongan	2015	0,3	69,84	15,38	120,58
Kabupaten Lamongan	2016	0,3	70,34	14,89	127,23
Kabupaten Lamongan	2017	0,32	71,11	14,42	103,91
Kabupaten Lamongan	2018	0,31	71,97	13,8	92,58
Kabupaten Lamongan	2019	0,32	72,57	13,21	93,65
Kabupaten Gresik	2014	0,28	72,84	13,41	110,07
Kabupaten Gresik	2015	0,31	73,57	13,63	94,98
Kabupaten Gresik	2016	0,33	74,46	13,19	77,35
Kabupaten Gresik	2017	0,29	74,84	12,80	91,78
Kabupaten Gresik	2018	0,27	75,28	11,89	101,02
Kabupaten Gresik	2019	0,28	76,1	11,35	107,79
Kabupaten Bangkalan	2014	0,33	60,71	22,38	134,29
Kabupaten Bangkalan	2015	0,32	61,49	22,57	143,8
Kabupaten Bangkalan	2016	0,31	62,06	21,41	120,54
Kabupaten Bangkalan	2017	0,3	62,3	21,32	170,2
Kabupaten Bangkalan	2018	0,29	62,87	19,59	95,95
Kabupaten Bangkalan	2019	0,31	63,79	18,9	121,45
Kabupaten Sampang	2014	0,23	56,98	25,80	158,36
Kabupaten Sampang	2015	0,3	58,18	25,69	117,49
Kabupaten Sampang	2016	0,31	59,09	24,11	112,25
Kabupaten Sampang	2017	0,29	59,9	23,56	156,91
Kabupaten Sampang	2018	0,26	61	21,21	98,62
Kabupaten Sampang	2019	0,27	61,94	20,71	112,58
Kabupaten Pamekasan	2014	0,26	62,66	17,74	204,63
Kabupaten Pamekasan	2015	0,34	63,1	17,41	136,07
Kabupaten Pamekasan	2016	0,36	63,98	16,70	125,01
Kabupaten Pamekasan	2017	0,33	64,93	16,00	165,66
Kabupaten Pamekasan	2018	0,33	65,41	14,47	135,91
Kabupaten Pamekasan	2019	0,34	65,94	13,95	126,48
Kabupaten Sumenep	2014	0,25	61,43	20,49	140,58
Kabupaten Sumenep	2015	0,26	62,38	20,20	103,62
Kabupaten Sumenep	2016	0,31	63,42	20,09	123,63
Kabupaten Sumenep	2017	0,24	64,28	19,62	99,37
Kabupaten Sumenep	2018	0,25	65,25	20,16	83,97
Kabupaten Sumenep	2019	0,30	66,22	19,48	96,83
Kota Kediri	2014	0,31	74,62	7,95	150,97

Kota Kediri	2015	0,4	75,67	8,51	172,47
Kota Kediri	2016	0,39	76,33	8,40	124,3
Kota Kediri	2017	0,4	77,13	8,49	144,86
Kota Kediri	2018	0,33	77,58	7,68	110,26
Kota Kediri	2019	0,32	78,08	7,16	118,78
Kota Blitar	2014	0,35	75,26	7,15	136,58
Kota Blitar	2015	0,37	76	7,29	147,1
Kota Blitar	2016	0,41	76,71	7,18	121,96
Kota Blitar	2017	0,39	77,1	8,03	158,34
Kota Blitar	2018	0,35	77,58	7,44	116,4
Kota Blitar	2019	0,34	78,56	7,13	95,68
Kota Malang	2014	0,37	78,96	4,80	110,8
Kota Malang	2015	0,38	80,05	4,60	120,23
Kota Malang	2016	0,41	80,46	4,33	125,72
Kota Malang	2017	0,42	80,65	4,17	143,67
Kota Malang	2018	0,41	80,89	4,1	114,51
Kota Malang	2019	0,34	81,32	4,07	110,23
Kota Probolinggo	2014	0,33	70,49	8,37	167,26
Kota Probolinggo	2015	0,36	71,01	8,17	131,13
Kota Probolinggo	2016	0,31	71,5	7,97	131,6
Kota Probolinggo	2017	0,37	72,09	7,84	133,74
Kota Probolinggo	2018	0,31	72,53	7,2	104,93
Kota Probolinggo	2019	0,27	73,27	6,91	99,91
Kota Pasuruan	2014	0,31	73,23	7,34	145,38
Kota Pasuruan	2015	0,39	73,78	7,47	123,73
Kota Pasuruan	2016	0,4	74,11	7,62	133,32
Kota Pasuruan	2017	0,38	74,39	7,53	114,16
Kota Pasuruan	2018	0,34	74,78	6,77	109,72
Kota Pasuruan	2019	0,31	75,25	6,46	116,31
Kota Mojokerto	2014	0,31	75,04	6,42	143,74
Kota Mojokerto	2015	0,36	75,54	6,16	139,22
Kota Mojokerto	2016	0,37	76,38	5,73	124,93
Kota Mojokerto	2017	0,39	76,77	5,73	109,18
Kota Mojokerto	2018	0,34	77,14	5,5	90,96
Kota Mojokerto	2019	0,31	77,96	5,15	93,58
Kota Madiun	2014	0,34	78,81	4,86	156,97
Kota Madiun	2015	0,38	79,48	4,89	147,86
Kota Madiun	2016	0,42	80,01	5,16	130,81
Kota Madiun	2017	0,36	80,13	4,94	144,74
Kota Madiun	2018	0,36	80,33	4,49	117,3

Kota Madiun	2019	0,35	80,88	4,35	122,06
Kota Surabaya	2014	0,39	78,87	5,79	111,96
Kota Surabaya	2015	0,42	79,47	5,82	114,64
Kota Surabaya	2016	0,39	80,38	5,63	106,54
Kota Surabaya	2017	0,39	81,07	5,39	122,53
Kota Surabaya	2018	0,36	81,74	4,88	105,52
Kota Surabaya	2019	0,41	82,22	4,51	103,69
Kota Batu	2014	0,29	71,89	4,59	134,48
Kota Batu	2015	0,36	72,62	4,71	130,05
Kota Batu	2016	0,34	73,57	4,48	92,25
Kota Batu	2017	0,3	74,26	4,31	120,45
Kota Batu	2018	0,33	75,04	3,89	113,29
Kota Batu	2019	0,32	75,88	3,81	119,82

**Nilai Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019
(Rasio)**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
Kab. Pacitan	0.4	0.35	0.39
Kab. Ponorogo	0.32	0.35	0.34
Kab. Trenggalek	0.34	0.38	0.37
Kab. Tulungagung	0.35	0.37	0.30
Kab. Blitar	0.35	0.37	0.33
Kab. Kediri	0.37	0.33	0.30
Kab. Malang	0.34	0.38	0.38
Kab. Lumajang	0.35	0.32	0.30
Kab. Jember	0.31	0.34	0.30
Kab. Banyuwangi	0.34	0.31	0.31
Kab. Bondowoso	0.34	0.35	0.30
Kab. Situbondo	0.32	0.36	0.32
Kab. Probolinggo	0.33	0.34	0.33
Kab. Pasuruan	0.36	0.32	0.31
Kab. Sidoarjo	0.34	0.35	0.31
Kab. Mojokerto	0.34	0.31	0.27
Kab. Jombang	0.32	0.32	0.33
Kab. Nganjuk	0.34	0.31	0.42
Kab. Madiun	0.33	0.33	0.33
Kab. Magetan	0.32	0.38	0.36
Kab. Ngawi	0.39	0.35	0.34
Kab. Bojonegoro	0.34	0.35	0.31
Kab. Tuban	0.29	0.36	0.30
Kab. Lamongan	0.31	0.31	0.32

Kab. Gresik	0.32	0.27	0.28
Kab. Bangkalan	0.29	0.29	0.31
Kab. Sampang	0.3	0.26	0.27
Kab. Pamekasan	0.29	0.33	0.34
Kab. Sumenep	0.33	0.25	0.30
Kota Kediri	0.24	0.33	0.32
Kota Blitar	0.4	0.35	0.34
Kota Malang	0.39	0.41	0.34
Kota Probolinggo	0.42	0.31	0.27
Kota Pasuruan	0.37	0.34	0.31
Kota Mojokerto	0.38	0.34	0.31
Kota Madiun	0.39	0.36	0.35
Kota Surabaya	0.36	0.36	0.41
Kota Batu	0.39	0.33	0.32
Jawa Timur	0.3	0.38	0.37

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 المعهد الإسلامي للدراسات والبحوث

LAMPIRAN II : Estimasi Persamaan Regresi

Analisis Deskriptif

	GR	HDI	POV	PAD
Mean	0.331641	70.04776	11.48740	124.3749
Median	0.330000	69.65500	11.03392	120.8550
Maximum	0.421250	82.22000	25.80000	204.6300
Minimum	0.230000	56.98000	3.810000	77.35000
Std. Dev.	0.038075	5.372534	4.726518	20.29966
Skewness	-0.003250	0.285647	0.632981	0.635430
Kurtosis	3.026916	2.471660	3.123187	3.592120
Jarque-Bera	0.007284	5.752446	15.36944	18.67408
Probability	0.996365	0.056347	0.000460	0.000088
Sum	75.61416	15970.89	2619.127	28357.47
Sum Sq. Dev.	0.329084	6552.157	5071.174	93541.30
Observations	228	228	228	228

Hasil Regresi *Common Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.105360	0.061680	1.708168	0.0890
HDI	0.003011	0.000723	4.164266	0.0000
POV	-0.000971	0.000816	-1.191022	0.2349
PAD	0.000213	0.000109	1.964333	0.0507
R-squared	0.272436	Mean dependent var		0.331641
Adjusted R-squared	0.262691	S.D. dependent var		0.038075
S.E. of regression	0.032694	Akaike info criterion		-3.985876
Sum squared resid	0.239430	Schwarz criterion		-3.925712
Log likelihood	458.3898	Hannan-Quinn criter.		-3.961602
F-statistic	27.95885	Durbin-Watson stat		1.218504
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.626383	0.229284	-2.731906	0.0069
HDI	0.011801	0.002739	4.308220	0.0000
POV	0.012503	0.003777	3.310333	0.0011
PAD	-9.81E-05	0.000124	-0.789133	0.4310

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variabls)

R-squared	0.579787	Mean dependent var	0.331641
Adjusted R-squared	0.489902	S.D. dependent var	0.038075
S.E. of regression	0.027194	Akaike info criterion	-4.210255
Sum squared resid	0.138285	Schwarz criterion	-3.593574
Log likelihood	520.9690	Hannan-Quinn criter.	-3.961443
F-statistic	6.450304	Durbin-Watson stat	1.797166
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.049651	0.094323	0.526389	0.5991
HDI	0.003968	0.001127	3.521944	0.0005
POV	0.000220	0.001290	0.170452	0.8648
PAD	1.19E-05	0.000105	0.113442	0.9098

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.015658	0.3202
Period random		0.000000	0.0000
Idiosyncratic random		0.022816	0.6798

Weighted Statistics			
R-squared	0.138703	Mean dependent var	0.169555
Adjusted R-squared	0.127168	S.D. dependent var	0.029746
S.E. of regression	0.027790	Sum squared resid	0.172992
F-statistic	12.02434	Durbin-Watson stat	1.572383
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.252705	Mean dependent var	0.331641
Sum squared resid	0.245923	Durbin-Watson stat	1.106076

Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.696622	(37,187)	0.0000
Cross-section Chi-square	125.158370	37	0.0000

Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section F	27.276670	3	0.0000